

Pusat Data dan Informasi  
Kementerian Pariwisata



# NESPARNAS

(Neraca Satelit Pariwisata Nasional)

## 2 0 1 4

NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (NESPARNAS) 2014

1



**Kementerian Pariwisata**

Website : <http://www.parekraf.go.id>

<http://www.indonesia.travel>

Email : [pusdatin@parekraf.go.id](mailto:pusdatin@parekraf.go.id)

ISBN : 978-602-7547-12-4

## KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) tahun 2014 merupakan publikasi lanjutan tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini memuat data dan menggambarkan kondisi pariwisata Indonesia tahun 2013.

Publikasi ini menyajikan informasi mengenai struktur konsumsi wisatawan, kegiatan investasi dan promosi di bidang pariwisata. Selain itu, juga disajikan informasi mengenai struktur tenaga kerja terkait pariwisata seperti pada usaha penyediaan akomodasi, jasa perjalanan wisata dan restoran yang merupakan hasil survei. Secara detil, buku Nesparnas 2014 memberikan gambaran tentang perilaku wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, maupun orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, dalam melakukan transaksi ekonomi dan konsumsi serta kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi domestik yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan. Oleh karena itu, publikasi ini dapat digunakan antara lain untuk mengukur dinamika kegiatan dan skala ekonomi yang terjadi akibat kegiatan pariwisata, mata rantai sektor-sektor ekonomi terkait pariwisata, serta peranan pariwisata dalam perekonomian nasional seperti dalam pembentukan PDB, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara dari pajak dan retribusi, serta dalam ekspor barang dan jasa.

Saran dan masukan sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dan cakupan dalam penyusunan Nesparnas di tahun-tahun mendatang. Semoga buku ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun strategi dan kebijakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2014

TIM PENYUSUN

## TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	:	Sasmito Hadiwibowo
Penanggung Jawab Teknis	:	Abdul Kadir Sentot Bangun Widoyono
Editor	:	Sentot Bangun Widoyono
Penulis	:	Norman Sasono OP Nababan Dedi Wiyatno Akhmad Tantowi Barudin
Pengolah Data/Penyiapan Draft	:	Wiwit Puji S Fadhlullah Diah Soendari Suryani Rayinda Citra Utami Septia Awal Hidayah Rina Irawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Permasalahan .....	6
1.3. Tujuan .....	6
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan .....	6
1.5. Metodologi .....	7
1.6. Tenaga Ahli .....	8
1.7. Tahapan Kegiatan .....	8
1.8. Institusi Terkait dalam Penyusunan Nesparnas .....	10
BAB 2 PEMAHAMAN NESPARNAS, PENYUSUNAN DAN SUMBER DATA .....	11
2.1. Pengertian Umum Nesparnas .....	12
2.2. Pemahaman Supply dan Demand .....	15
2.2.1. Supply .....	17
2.2.2. Demand .....	18
2.3. Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata .....	20
2.3.1. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara .....	20
2.3.2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri ( <i>Outbound</i> ) .....	22
2.3.3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara ( <i>Inbound</i> ) .....	24
2.3.4. Struktur Investasi Pariwisata .....	26
2.3.5. Struktur Pengeluaran Lainnya Terkait Pariwisata .....	28

2.4.	Jenis-Jenis Tabel/Subneraca Nesparnas .....	30
2.5.	Model Pengukuran Dampak Pariwisata .....	31
BAB 3	STRUKTUR TENAGA KERJA .....	38
3.1.	Struktur Tenaga Kerja Perhotelan .....	39
3.2.	Struktur Tenaga Kerja Usaha Objek Daya Tarik Wisata .....	42
3.3	Struktur Tenaga Kerja Usaha Restoran/Rumah makan .....	44
BAB 4	STRUKTUR PENGELUARAN WISATAWAN DAN INVESTASI PARIWISATA .....	47
4.1.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara .....	48
4.2.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara .....	53
4.3.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (Wisnas) .....	57
4.4.	Struktur Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Investasi Pariwisata .....	59
4.5.	Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi Pariwisata .....	63
BAB 5	ANALISIS NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL .....	66
5.1.	Peranan Pariwisata dalam Perekonomian .....	67
5.2.	Dampak Ekonomi Pariwisata .....	70
5.2.1.	Dampak Terhadap Output .....	74
5.2.2.	Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)..	75
5.2.3.	Dampak Terhadap Upah dan Gaji .....	76
5.2.4.	Dampak Terhadap Pajak Tak Langsung .....	77
5.2.5.	Dampak Terhadap Tenaga Kerja .....	78
5.3.	Perspektif Pariwisata Indonesia dalam Konteks Dunia .....	80
	DAFTAR PUSTAKA .....	86
	LAMPIRAN TABEL-TABEL .....	88

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Input-Output Untuk Sistem Perekonomian dengan Tiga Sektor Produksi .....	33
Tabel 3.1.	Jumlah Pekerja pada Usaha Akomodasi menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2013 .....	40
Tabel 3.2.	Struktur Pekerja pada Usaha Hotel Berbintang menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 .....	41
Tabel 3.3.	Struktur Pekerja pada Usaha Akomodasi Lainnya menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 .....	42
Tabel 3.4.	Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Objek Daya Tarik Wisata menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 .....	43
Tabel 3.5.	Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Objek Daya Tarik Wisata menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 .....	44
Tabel 3.6.	Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Restoran/Rumah makan menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 .....	45
Tabel 3.7.	Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Restoran/Rumah makan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013 .....	46
Tabel 4.1.	Jumlah Perjalanan Wisnus di Indonesia, Tahun 2009-2013 (ribu perjalanan) .....	49
Tabel 4.2.	Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	50

Tabel 4.3.	Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Asal Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	51
Tabel 4.4.	Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Tujuan Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	52
Tabel 4.5.	Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Indonesia Menurut Negara Tempat Tinggal, Tahun 2009 – 2013 .....	53
Tabel 4.6.	Struktur Pengeluaran Wisman Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	55
Tabel 4.7.	Pengeluaran Wisman untuk Angkutan Internasional Indonesia Menurut Jenis Angkutan, Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	56
Tabel 4.8.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri, Tahun 2009-2013 (ribu perjalanan) .....	57
Tabel 4.9.	Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri Menurut Kategori Pengeluaran dan Jenis Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	58
Tabel 4.10.	Struktur Investasi Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung Maupun Tidak Langsung, Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	60
Tabel 4.11.	Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan Pembinaan Sektor Pariwisata, Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	64
Tabel 5.1.	Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Penggunaan, Tahun 2013 (triliun rupiah) .....	68
Tabel 5.2.	Peranan Pariwisata dalam Investasi Nasional, Tahun 2013 (persen) .....	69
Tabel 5.3.	Ringkasan Pengeluaran Terkait Pariwisata Indonesia, Tahun 2013 (miliar rupiah) .....	71
Tabel 5.4.	Dampak Ekonomi Pariwisata Tahun 2013 .....	73
Tabel 5.5.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Dunia Tahun 2012 dan 2013 (juta orang) .....	81

Tabel 5.6.	Jumlah Penerimaan dari Wisman Dunia Tahun 2012 dan 2013 .....	82
Tabel 5.7.	Sepuluh Negara Tujuan Wisata Utama di Dunia Tahun 2012 dan 2013 .....	83
Tabel 5.8.	Sepuluh Negara Penghasil Devisa Utama di Dunia Tahun 2012 dan 2013 .....	85

# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Industri pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Peningkatan jumlah destinasi dan investasi dalam pembangunan pariwisata, telah mengubah pariwisata sebagai penggerak utama (*key driver*) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Organisasi Pariwisata Dunia (*World Tourism Organization/UNWTO*) memperkirakan wisatawan internasional akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan kunjungan diperkirakan 3,3 persen per tahun. Untuk wilayah Asia dan Pasifik diperkirakan dapat dicapai pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 4,9 persen, bahkan di negara tertentu pertumbuhannya jauh lebih tinggi.

Angka perkiraan UNWTO ini sudah tentu sangat menggiurkan pelaku usaha pariwisata. Potensi besar itu tidak boleh dibiarkan hanya menjadi peluang liar yang tidak mampu ditangkap. Oleh sebab itu, banyak negara di dunia berpacu dan berbenah diri untuk membangun industri pariwisatanya. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

Di tengah kompetisi dunia yang sangat ketat, ditambah dengan ancaman krisis ekonomi dan politik global yang masih dialami oleh banyak negara dalam beberapa tahun terakhir, maka dibutuhkan inovasi dan strategi yang tepat dan produktif untuk merebut pasar pariwisata. Keterkaitan lintas sektor pariwisata akan menjadi mata rantai pendukung bagi gerak ke depan (*moving forward*) pembangunan nasional.

Menangani industri pariwisata lebih sulit dan rumit dibandingkan sektor lain. Hal ini dikarenakan penanganan industri pariwisata melibatkan hampir semua sektor ekonomi baik industri yang berkarakter pariwisata (*tourism characteristic industry*), seperti hotel dan restoran, maupun industri yang sepiintas tidak berkaitan langsung dengan industri pariwisata, namun sebagian permintaannya (*demand*) berasal dari pariwisata (*tourism connected industry*). Jumlah industri yang terkait dan menerima dampak dari kegiatan pariwisata sangat banyak.

Terkait perkembangan pariwisata Indonesia, program Visit Indonesia, yang dicanangkan sejak tahun 2008 dan dilanjutkan hingga sekarang, telah membawa semangat baru bagi masyarakat pariwisata di Indonesia. Melalui upaya promosi dan peningkatan pelayanan, didukung membaiknya situasi keamanan, serta pemulihan dari krisis ekonomi global yang banyak dialami negara-negara Eropa, statistik kedatangan wisatawan mancanegara (*wisman*) ke Indonesia pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8,80 juta, naik 9,42 persen dibanding jumlah wisman tahun 2012.

Disamping peningkatan jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Indonesia adalah pergerakan wisatawan nusantara (*wisnus*). Disadari bahwa peranan wisnus merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata (Kemendagri) semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan atau wisata di dalam negeri. Dengan slogan “Ayo Jelajahi Nusantara”, “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu”, diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri. Pada tahun 2013 jumlah perjalanan wisnus mencapai 250,04 juta.

Meningkatnya promosi oleh Dinas Pariwisata Daerah (Disparada) yang dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Dengan adanya kegiatan perjalanan wisata, diharapkan akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri. Konsumsi atau belanja wisatawan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang pada akhirnya akan mendorong perkembangan pariwisata pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya.

Nilai ekonomi penjualan jasa pariwisata kadang tidak dapat diukur secara nyata dalam bentuk nominal langsung. Nilai ekonomi tersebut seringkali terkesan hanya langsung berhubungan dengan para pelaku pariwisata. Namun, sesungguhnya nilai ekonomi dari kegiatan pariwisata tidak hanya dinikmati oleh satu sektor tertentu, tapi juga dinikmati oleh berbagai sektor. Sebagai contoh, seorang wisatawan membeli sebuah cinderamata, maka yang akan menikmati rantai dari pembelian tersebut adalah penjual, pembuat cinderamata, distributor dan bahkan pembuat bahan baku cinderamata tersebut yang dalam kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam industri. Dengan meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentu akan semakin besar dampak ekonomi yang dinikmati dan semakin banyak sektor yang terkait.

Untuk melihat keterkaitan antar sektor serta dampak ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata, dibutuhkan data yang akurat, terpercaya, terkini dan konsisten yang meliputi aspek-aspek yang terkait dengan pariwisata. Disamping itu, agar terlihat asas manfaat untuk masyarakat luas, perlu penyajian informasi yang jelas dan menyeluruh dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Hal tersebut sejalan dengan dinamika masyarakat sekarang ini, dimana tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi suatu keharusan. Dengan adanya informasi pariwisata yang komprehensif, masyarakat dan dunia usaha diharapkan akan lebih memberikan perhatiannya

dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia.

Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, maka perlu disusun suatu sistem yang dapat memperlihatkan peranan pariwisata secara komprehensif. Neraca Satelit Pariwisata Nasional atau yang disingkat dengan Nesparnas adalah suatu sistem neraca terpadu sektor pariwisata yang mampu menjawab tuntutan tersebut. Kajian dan analisis hasil pembangunan kepariwisataan yang selama ini baru mencakup sebagian aspek dan dilakukan secara terpisah-pisah, diharapkan pada masa mendatang menjadi kajian yang lebih menyeluruh dan konsisten dengan diterapkannya metode Nesparnas yang dilakukan secara berkesinambungan.

Penerapan metode Nesparnas ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, yang bertujuan agar dapat tersusun informasi pariwisata dan kegiatan yang terkait pariwisata secara lengkap, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Nesparnas merupakan suatu konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif sektor pariwisata yang menyediakan perangkat analisis yang menyeluruh (*comprehensive*), padat (*compact*), saling berkaitan (*interconnected*), konsisten (*consistent*) dan terkontrol (*controllable*). Sistem ini terbilang ampuh dan handal dalam menjawab tantangan penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kepariwisataan pada masa lalu sekaligus menjawab tantangan dan permasalahan pariwisata di masa datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyusunan Nesparnas setiap tahun menjadi sangat penting, mengingat kebutuhan mendesak baik dalam menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata maupun kebutuhan analisis yang lebih luas mengenai kinerja sektor pariwisata di Indonesia serta dampak ekonomi yang diciptakan.

## 1.2. Permasalahan

Permasalahan pokok dalam menjawab tantangan di atas adalah bagaimana menyusun dan membentuk sistem dan kerangka informasi kuantitatif kepariwisataan Indonesia yang akurat, handal, konsisten, dan komprehensif, yang mencakup aspek mikro dan makro ekonomi, serta akomodatif terhadap rekomendasi badan-badan dunia (UNWTO, WTTC).

Dalam perumusan masalah di atas, submasalah yang diangkat dalam tahapan kegiatan saat ini, yang merupakan kelanjutan dan melengkapi kegiatan tahun sebelumnya adalah bagaimana melengkapi data dasar, seperti jumlah wisatawan nusantara, tenaga kerja dan investasi baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan pariwisata dan pengeluaran dunia usaha untuk pariwisata atau yang terkait.

## 1.3. Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyusun Nesparnas dan mempertajam data-data pokok yang akan digunakan dalam penyusunan tabel-tabel Nesparnas. Nesparnas disusun dalam bentuk set data kuantitatif dan kualitatif yang berfungsi sebagai kerangka dasar pengembangan subsistem informasi untuk melihat kegiatan kepariwisataan dalam dimensi sektor ekonomi dan wilayah. Nesparnas disusun dengan tujuan untuk melihat peranan atau kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional. Dari hasil tersebut diharapkan dapat dibuat kebijakan yang tepat dan terarah.

## 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan mencakup dua hal:

### A. Kegiatan penyusunan Nesparnas

Penyusunan Nesparnas mencakup dua sisi dari kegiatan pariwisata yaitu sisi permintaan yang mencakup konsumsi wisatawan, investasi,

dan promosi, serta sisi penawaran yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.

B. Kegiatan pengumpulan data dunia usaha pariwisata

Dalam pengumpulan data tenaga kerja dan pengeluaran dunia usaha untuk pariwisata dalam rangka penyusunan Nesparnas dan membuat tabel-tabel yang sesuai dengan rekomendasi yang ada, meliputi dua hal: *pertama*, data tenaga kerja kegiatan dunia usaha yang terkait dengan kegiatan pariwisata, *kedua* data pengeluaran dunia usaha untuk pariwisata.

## 1.5. Metodologi

A. Metodologi Penyusunan Nesparnas

- 1) Pengumpulan data mengenai jumlah dan konsumsi wisatawan diperoleh dari data sekunder, yaitu untuk jumlah dan konsumsi wisatawan nusantara diperoleh dari hasil Survei Profil Wisatawan Nusantara yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah dan konsumsi wisatawan mancanegara diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES), dan konsumsi wisatawan Indonesia ke luar negeri diperoleh dari Survei Outbound.
- 2) Dalam mengukur dampak atau peranan pariwisata terhadap perekonomian digunakan model Input Output. Model ini menggunakan Tabel Input Output (I-O) yang berupa suatu matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi wisatawan, investasi sektor pariwisata dan promosi pariwisata di dalam Tabel I-O merupakan faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Selanjutnya

masing-masing struktur pengeluaran dari permintaan akhir tersebut diklasifikasikan kembali mengikuti klasifikasi sektor I-O dan mengalikannya dengan koefisien multiplier Leontief untuk memperoleh dampaknya.

B. Metodologi Pengumpulan Data Pengeluaran Dunia Usaha untuk Pariwisata

Pengumpulan data primer pada kegiatan ini adalah melalui wawancara langsung terhadap responden terpilih.

### 1.6. Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Nesparnas Tahun 2013, telah disiapkan suatu **Tim Tenaga Ahli** dari berbagai disiplin ilmu terkait, yaitu ahli metodologi dan *design survey*, ahli neraca nasional, ahli analisis statistik, ahli statistik pariwisata, serta dibantu oleh tenaga operator komputer dan sekretariat/administrasi. Tim bertugas melaksanakan semua kegiatan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai laporan akhir, dan setiap anggota tim memberikan kontribusinya sesuai tugas dan keahliannya. Tim dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas secara langsung mengkoordinasikan seluruh kegiatan masing-masing anggota.

### 1.7. Tahapan kegiatan

A. Perencanaan dan persiapan

1) Studi literatur

Seperti pada tahun sebelumnya, sebagai awal dari kegiatan ini akan dilakukan studi literatur dari *Tourism Satellite Account (TSA)* yang telah direvisi dan dimodifikasi oleh beberapa negara dan evaluasi data tenaga kerja yang telah ada dalam penyusunan Nesparnas sebelumnya.

- 2) Penyusunan variabel dan kerangka tabel pokok nesparnas  
Variabel-variabel dan data pokok yang diperlukan dalam penyusunan nesparnas, terutama data pengeluaran wisatawan dan investasi, diinventarisir dan dikumpulkan pada tahap ini. Data-data tersebut merupakan data sekunder hasil survei yang telah dilakukan. Selain itu juga menyusun kerangka tabel pokok dan data penunjang yang diperlukan.
- 3) Penyusunan daftar isian  
Untuk memperoleh data primer maupun sekunder maka akan disusun kuesioner sebagai alat pengumpulan data beserta pedoman cara pengisiannya yang didahului dengan menginventarisir item-item yang diperlukan.

B. Pelaksanaan lapangan

Pengumpulan data lapangan dalam hal ini, akan dilakukan oleh petugas yang telah dilatih dengan menggunakan kuesioner yang telah terstruktur.

C. Pengolahan

- 1) Pengolahan data pengeluaran wisnus dan dunia usaha untuk pariwisata  
Untuk mempercepat hasil studi ini dilakukan pengolahan dengan sistem komputer dimana dilakukan tahapan-tahapan standar seperti: *editing, coding, entry* data, tabulasi dan analisis.
- 2) Pengolahan Nesparnas  
Pengolahan pada tahap ini menggunakan Tabel Input Output. Data permintaan akhir dari pariwisata yang telah dikumpulkan pada tahap awal, diklasifikasikan kembali sesuai struktur sektor di Tabel I-O. Dengan menggunakan model dan persamaan matriks yang ada, maka akan diperoleh dampak pariwisata terhadap komponen perekonomian Indonesia.

3) Pembahasan hasil

Sebelum dilakukan analisis perlu dilakukan pembahasan tabel-tabel hasil studi, baik untuk hasil survei dunia usaha, maupun hasil nesparnas secara keseluruhan, untuk lebih mencermati data menurut berbagai karakteristik.

4) Analisis dan penyajian

Sebagai output akhir kegiatan ini adalah analisis dari hasil tabel-tabel olahan yang sudah selesai dibahas dalam bentuk laporan.

### **1.8. Institusi Terkait dalam Penyusunan Nesparnas**

Kerja sama antar institusi/lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan penyusunan Nesparnas ini. Dalam penyusunan Nesparnas ini, ada tiga institusi pemerintah yang terlibat langsung yaitu Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia. Adapun tim utama dalam penyusunan Nesparnas ini adalah BPS, terutama yang bertanggung jawab dalam penyusunan Statistik Pariwisata dan Neraca Nasional. BI terlibat dalam penyusunan ini dikarenakan data-data yang diperlukan dalam penyusunan neraca perjalanan, diperoleh dari hasil Nesparnas. Kementerian Pariwisata bertanggung jawab dalam mengorganisasi sumber data utama yaitu data pengeluaran wisman dan pengeluaran wisatawan outbound. Ketiga tim ini melakukan diskusi secara reguler khususnya untuk memecahkan masalah teknis seperti bagaimana mendapatkan sumber data, konsep dan definisi serta kerangka Nesparnas.

Di dalam struktur organisasi BPS, terdapat tim Input-Output yang bertanggung jawab dalam penyusunan Tabel I-O. Tabel yang digunakan dalam penyusunan Nesparnas kali ini adalah tabel I-O 2005 hasil updating tahun 2008. Sebagian dari tim penyusunan tabel I-O terlibat juga dalam penyusunan Nesparnas ini, sehingga Tabel I-O tersebut dapat langsung diimplementasikan ke dalam Nesparnas.

## **BAB 2**

# **PEMAHAMAN NESPARNAS, PENYUSUNAN, DAN SUMBER DATA**

## BAB II

### PEMAHAMAN NESPARNAS, PENYUSUNAN, DAN SUMBER DATA

#### 2.1. Pengertian Umum Nesparnas

Nesparnas merupakan perangkat neraca yang berisikan data tentang peran kegiatan pariwisata dalam tatanan ekonomi nasional. Disebut sistem karena terdiri dari berbagai elemen neraca, dimana satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi, yang digambarkan melalui keterkaitan berbagai jenis transaksinya. Secara spesifik Nesparnas berisikan data tentang perilaku pariwisata dalam melakukan transaksi ekonomi dengan berbagai institusi ataupun pelaku-pelaku ekonomi domestik dalam bentuk neraca dan matriks.

Nesparnas menggambarkan semua kegiatan dan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan barang-barang dan jasa pariwisata, baik sisi produksi (*supply*) maupun sisi permintaan (*demand*). Sebagai suatu sistem data yang komprehensif, cakupan Nesparnas meliputi: (1) struktur ekonomi dari sektor pariwisata, (2) struktur pengeluaran wisatawan dan besarnya, (3) struktur sektor yang terkait pariwisata, (4) struktur investasi pariwisata dan kontribusinya dalam investasi daerah, (5) struktur pekerja di sektor pariwisata dan kontribusinya pada pekerja daerah dan (6) peran sektor pariwisata pada perekonomian daerah.

Sebagai perluasan dari Sistem Neraca Nasional (SNN), Nesparnas dapat digunakan antara lain untuk melihat keterkaitan transaksi yang terjadi antara pelaku pariwisata dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya (termasuk penyedia jasa pariwisata) secara mutual. Disamping itu dapat mengetahui bagaimana

peran dan berapa besar kontribusi kegiatan pariwisata dalam sistem ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun secara konsep sangat dimungkinkan membangun neraca-neraca pendukung lainnya dalam Nesparnas dengan mengikuti struktur dan konsep SNN, tetapi kesulitan utama yang dihadapi adalah ketersediaan data dasar. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia, Nesparnas yang dibangun di sini hanya akan difokuskan pada kegiatan di sektor produksi atau yang umumnya disebut sebagai sektor riil. Melalui perangkat ini dapat diketahui dampak kegiatan pariwisata dalam tatanan ekonomi nasional, yang juga bermanfaat bagi perbandingan di tingkat interdaerah.

Dengan demikian, maka perangkat Nesparnas yang akan disajikan dalam kajian ini hanya berisikan informasi tentang hubungan antara kegiatan pariwisata dengan kegiatan proses produksi barang dan jasa, dalam wilayah ekonomi Indonesia. Hubungan tersebut merupakan interaksi antara pelaku pariwisata dengan produsen pariwisata, dan antar produsen pariwisata itu sendiri. Beberapa analisis akan diturunkan dari perangkat tersebut, diantaranya analisis tentang nilai tambah yang diturunkan ataupun analisis tentang dampak pariwisata terhadap kegiatan ekonomi di sektor riil.

Hubungan transaksi antara pelaku pariwisata (fungsi konsumsi) dengan pelaku ekonomi (fungsi produksi) domestik tersebut dalam konteks makro disebut sebagai interaksi antara *Supply* dan *Demand*. Apabila pada keseimbangan makro *Supply* harus sama dengan *Demand*, maka hukum ini tidak berlaku sepenuhnya bagi kegiatan ekonomi pariwisata. Tidak semua produk kegiatan ekonomi tersebut langsung dikonsumsi habis oleh pariwisata, karena ada kegiatan diluar pariwisata yang juga mengkonsumsi produk tersebut. Produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik tersebut apabila dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara (*non-resident*) maka akan dicatat sebagai ekspor suatu negara. Begitu pula berlaku sebaliknya

apabila produk negara lain dikonsumsi oleh wisatawan nusantara (*resident*) akan dicatat sebagai impor.

Kemudian untuk selanjutnya struktur neraca yang akan disajikan dalam Nesparnas disini adalah keterkaitan *Demand* pariwisata terhadap *Supply* pariwisata yang diturunkan dari neraca produksi, tabel Produk Domestik Bruto (PDB) serta tabel Input-Output. Dari neraca produksi dapat dilihat struktur neraca kegiatan ekonomi khusus yang layanan/produknya memang sebagian besar ditujukan bagi permintaan wisatawan, baik dalam negeri (*wisnus*) maupun luar negeri (*wisman*). Hubungan tersebut menggambarkan transaksi langsung yang terjadi antara *Supply* dengan *Demand*. Sedangkan hubungan secara tidak langsung akan disajikan dalam tabel Input-Output. Tabel Input-Output yang disajikan dalam bentuk matriks tersebut juga akan menghitung dampak kegiatan pariwisata terhadap tatanan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di sektor riil (*multiplier effect*).

Oleh sebab itu untuk lebih memahami pengertian Nesparnas, disini difokuskan pada kegiatan produksi pariwisata yang berkaitan dengan sektor riil, yang diantaranya menghasilkan parameter-parameter ekonomi makro seperti tentang output yang dihasilkan, struktur biaya antara, nilai tambah yang diturunkan, investasi fisik yang direalisasikan, serta ekspor dan impor. Informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel maupun sel-sel matriks, yang semuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nesparnas.

Dengan demikian makna esensi Nesparnas sebenarnya adalah ingin melihat keseimbangan yang terjadi antara sisi penyediaan dan sisi permintaan jasa pariwisata dalam arti yang lebih spesifik. Selain itu juga untuk melihat kontribusi kegiatan pariwisata dalam mendukung sistem perekonomian daerah.

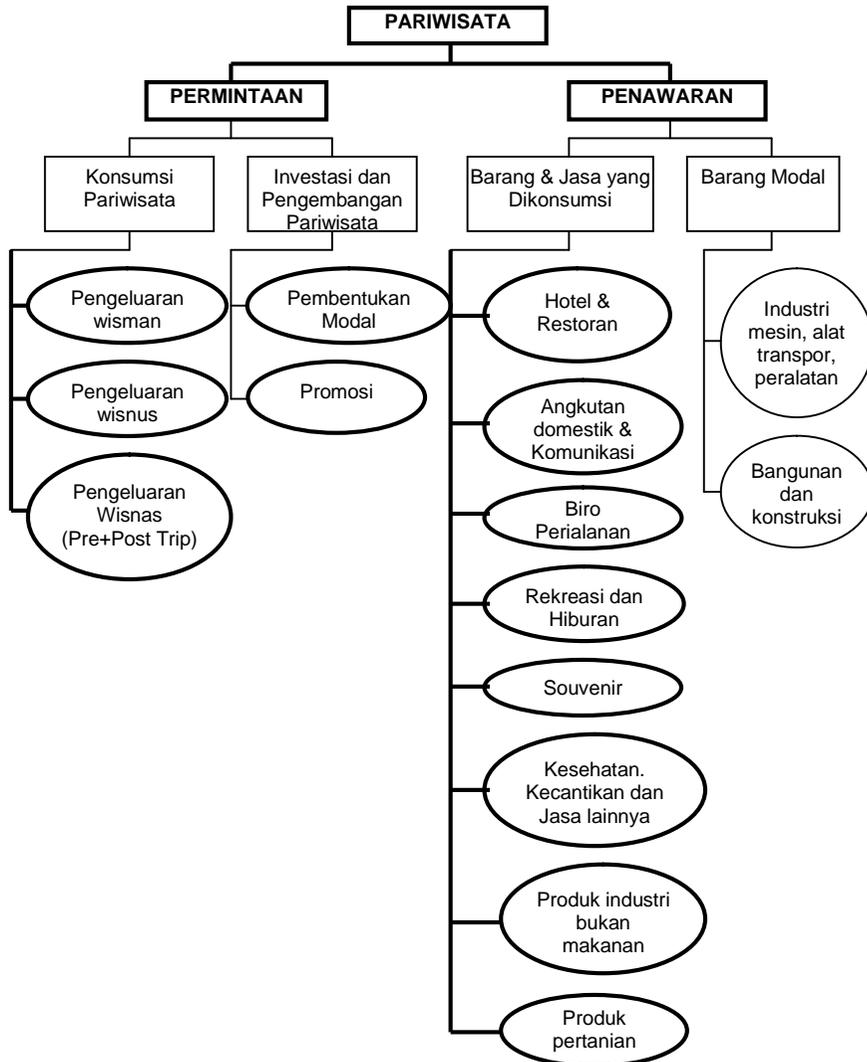
## 2.2. Pemahaman *Supply* dan *Demand*

Meskipun mengacu pada konsepsi yang sama, *Supply* (penyediaan atau penawaran) dan *Demand* (permintaan) bagi kegiatan pariwisata disini mempunyai arti yang lebih spesifik. Interaksi ini lebih menggambarkan tentang keseimbangan transaksi ekonomi antara industri pariwisata dengan wisatawan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Meningkatnya jumlah wisatawan secara luar biasa dalam satu dekade terakhir memberikan dampak bagi pertumbuhan industri pariwisata, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyelenggaraan paket-paket wisata yang ditawarkan oleh agen perjalanan wisata atau biro perjalanan merupakan salah satu contoh bagaimana industri pariwisata selalu berusaha untuk memberikan layanan yang lebih baik sehingga wisatawan dapat menikmati layanan yang agak berbeda, bahkan jika dilihat dari segi biaya juga bisa lebih murah.

Dari sisi penyediaan produk jasa pariwisata, terdapat berbagai aktivitas seperti hotel, restoran, transportasi, agen perjalanan, rekreasi dan hiburan, objek wisata, serta kegiatan penunjang seperti persewaan, *money changer*, pusat industri kerajinan, pusat pertokoan, dan sebagainya. Termasuk juga disini penyediaan layanan pemerintah dalam hal keimigrasian, kepabeanan, informasi pariwisata, keamanan dan sejenisnya

Sedangkan sisi permintaan atau *tourist demand* merupakan permintaan akan barang dan jasa oleh wisatawan untuk tujuan dikonsumsi langsung yang jenisnya merupakan produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata tersebut. Secara sederhana pemisahan antara sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dapat dilihat dalam Diagram 2.1.

Diagram 2.1. Ruang Lingkup Ekonomi Pariwisata dari Sisi Permintaan dan Penawaran



### 2.2.1. *Supply* (Penyediaan/Penawaran)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, usaha pariwisata meliputi tiga belas jenis utama, yaitu: daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, dan spa. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual dalam suatu lokasi tertentu, mempunyai catatan administrasi tersendiri dan ada salah satu orang yang bertanggung jawab.

Untuk kepentingan analisis, telah disusun Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia (KLUPI) berdasarkan rekomendasi dari badan-badan internasional (UN, dan UNWTO), seperti: *Standard International Classification of Tourism Activity* (SICTA), *Tourism Specific Product* (TSP) dan *International Standard of Industrial Classification* (ISIC). Sehingga klasifikasi tersebut sudah merupakan penggolongan operasional bagi kegiatan industri pariwisata yang telah berkembang di Indonesia selama ini. Klasifikasi ini lebih menekankan pada penggolongan kegiatan ekonomi menurut pelaku produksi (produsen).

### 2.2.2. Demand (Permintaan)

#### a. Klasifikasi

Dari sisi permintaan terdapat aktivitas ekonomi konsumsi yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara (*wisman* atau *inbound tourist*), wisatawan nusantara (*wisnus*), wisatawan Indonesia ke luar negeri (*wisnas* atau *outbond tourist*). Sisi permintaan juga mencakup investasi dan promosi di sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Konsep yang digunakan dalam penyusunan Nesparnas adalah permintaan pariwisata dan bukan konsumsi pariwisata karena Nesparnas mencoba untuk mencakup lebih banyak kegiatan pariwisata.

#### b. Konsep Wisatawan nusantara, Wisatawan mancanegara dan Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri

Dengan demikian maka konsep dan definisi wisatawan apabila dilihat dari sisi permintaan adalah sebagai berikut:

##### **Wisatawan nusantara**

Adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia (perjalanan dalam negeri) secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria:

Mereka yang melakukan perjalanan ke objek wisata komersial, tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial serta apakah perjalanannya lebih atau kurang dari 100 km pp.

Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel/penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km pp.

Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial dan tidak menginap di hotel/penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km pp.

### **Wisatawan mancanegara (*inbound*)**

Sesuai dengan rekomendasi *World Tourism Organization* (WTO) dan *International Union Office Travel Organization* (IUOTO) batasan/definisi wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi. Wisman pada dasarnya dibagi dalam dua golongan:

- (1) Wisatawan (*Tourist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dituju paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dengan tujuan (a) berlibur, rekreasi dan olah raga, (b) bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.
- (2) Pelancong (*Excursionist*), yaitu pengunjung yang tinggal di negara yang dituju kurang dari 24 jam, termasuk *cruise passanger* yang berkunjung ke suatu negara dengan kapal pesiar untuk tujuan wisata, lebih atau kurang dari 24 jam tetapi tetap menginap di kapal bersangkutan.

### **Wisatawan Indonesia yang ke luar negeri (*outbound*)**

Konsep wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri bukan untuk bekerja atau memperoleh penghasilan di luar negeri dan tinggal tidak lebih dari 6 bulan dengan maksud kunjungan antara lain: (a) berlibur, (b) bisnis, (c) kesehatan, (d) pendidikan, (e) misi/pertemuan/kongres, (f) mengunjungi teman/ keluarga, (g) keagamaan, (h) olahraga, dan (i) lainnya.

### **2.3. Penyusunan Pengeluaran Terkait Pariwisata**

Dalam menyusun Nesparnas dibutuhkan berbagai jenis data baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata maupun data makro. Jenis data dalam Nesparnas pada umumnya berupa data kuantitatif yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja sektor pariwisata dalam suatu perekonomian negara.

#### **2.3.1 Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara**

Pengeluaran yang dicatat dalam pengumpulan data wisatawan nusantara adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 230 juta lebih pada tahun 2010 dan mulai meningkatnya kesejahteraan penduduk Indonesia, maka tingkat mobilitas penduduk Indonesia juga ikut meningkat. Peningkatan mobilitas penduduk ini mengindikasikan adanya peningkatan penduduk yang melakukan perjalanan “wisata” dalam pengertian luas. Karena seperti dijelaskan sebelumnya, perjalanan “wisata” yang digunakan sebagai konsep dasar dalam mengumpulkan data wisnus tidak hanya mencakup mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan berekreasi atau berlibur saja tetapi juga termasuk mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis,

keagamaan, kesehatan, olah raga, seminar/pertemuan, maupun mengunjungi teman/keluarga. Semua orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan tersebut bisa dikategorikan sebagai wisnus apabila perjalanan tidak dilakukan lebih dari 6 bulan, perjalanannya bukan merupakan lingkungan sehari-hari, dan bukan untuk tujuan memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.

Pengumpulan data wisnus selama ini dilakukan dengan pendekatan rumahtangga melalui Survei Sosial Ekonomi Daerah (Susenas) dengan metode sampel. Adapun rincian tentang pengeluaran yang ditanyakan mencakup biaya-biaya untuk:

1. Akomodasi
2. Makan dan minum
3. Angkutan, baik angkutan darat, angkutan air, maupun angkutan udara
4. Paket perjalanan
5. Pemandu wisata
6. Hiburan dan rekreasi
7. Cinderamata atau oleh-oleh
8. Kesehatan
9. Lain-lain

Semua rincian biaya diatas adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk selama melakukan perjalanan, baik yang dibayar sendiri maupun yang dibayar oleh pihak lain. Disini juga termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh penduduk yang melakukan perjalanan yang sudah menikmati barang atau jasa selama dalam perjalanan namun pembayaran atas barang atau jasa tersebut dilakukan setelah selesai melakukan perjalanan. Bahkan secara konsep pengeluaran perjalanan juga termasuk pengeluaran yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan tetapi akan digunakan

dalam perjalanan, seperti membeli film untuk kamera yang akan digunakan dalam perjalanan. Dalam hal ini termasuk juga pengeluaran yang dilakukan setelah melakukan perjalanan yang masih berkaitan dengan perjalanan yang telah dilakukan, seperti biaya cuci cetak film.

### **2.3.2 Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (*outbound*)**

Jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri akhir-akhir ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Berdasarkan iklan paket tur ke luar negeri yang cukup gencar di mass media ini menunjukkan bahwa pasar wisata ke luar negeri banyak diminati utamanya oleh mereka yang berkecukupan. Dari data yang ada, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri atau selanjutnya disebut dengan wisatawan daerah (*wisnas*), untuk 19 pintu keluar utama, jumlahnya sudah hampir menyamai wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Dan tentu ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang membaik, dalam arti mereka memiliki pendapatan lebih yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan.

Untuk menghitung secara pasti jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri bisa diperoleh dari Ditjen Imigrasi. Namun apabila ingin dilihat negara tujuan mereka di luar negeri masih belum bisa terpenuhi dari kartu kedatangan dan keberangkatan untuk Warga Negara Indonesia (WNI), karena dalam kartu tersebut tidak ditanyakan negara tujuan yang akan dikunjungi. Data mengenai karakteristik *wisnas* saat ini belum tersedia sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Secara teori data ini sebenarnya bisa diperoleh dari pencatatan Ditjen Imigrasi dengan menggunakan kartu kedatangan dan keberangkatan

(*A/D Card*), karena setiap orang yang akan pergi atau datang ke Indonesia harus menyerahkan isian *A/D Card*. Namun bagi WNI yang akan meninggalkan Indonesia informasi yang ada dalam *A/D Card* tidak selengkap seperti WNA yang akan datang ke Indonesia. Sehingga data yang diperoleh berkaitan dengan data penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri juga sangat terbatas. Bahkan untuk mengetahui negara mana saja yang dikunjungi pada saat penduduk Indonesia bepergian ke luar negeri, tidak dapat diperoleh dari *A/D Card*.

Data pengeluaran penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri diperoleh dengan survei yang dilakukan di beberapa pintu keluar (*Outbound Survey*). Pendekatan yang dilakukan adalah mewawancarai mereka saat tiba di Indonesia dan menanyakan berbagai karakteristik perjalanan mereka termasuk biaya perjalanan mereka di luar negeri. Dalam menanyakan pengeluaran biaya tiket perjalanan dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya, dipisah (atau bahkan tidak ditanyakan) karena dalam konsep neraca, biaya tersebut sudah termasuk dalam neraca jasa-jasa (angkutan). Sementara itu biaya transportasi selama di luar negeri tetap dicatat.

Jenis pengeluaran yang ditanyakan dalam survei outbound ini hampir sama dengan survei wisnus, yaitu:

1. Akomodasi
2. Makan dan minum
3. Angkutan, baik angkutan darat, angkutan air, maupun angkutan udara yang dilakukan di luar negeri (tidak termasuk angkutan dari dan ke Indonesia)
4. Paket perjalanan
5. Pemandu wisata
6. Rekreasi dan hiburan
7. Cenderamata atau oleh-oleh

8. Kesehatan dan kecantikan
9. Lain-lain

Dalam rincian pengeluaran di atas juga termasuk pengeluaran sebelum maupun sesudah melakukan perjalanan dari luar negeri yang masih berkaitan dengan perjalanannya seperti contoh dalam wisnus.

### **2.3.3 Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (*Inbound*)**

Secara konsep penghitungan wisman dilakukan berdasarkan rekomendasi World Tourism Organization (UNWTO) yaitu melalui UPT Imigrasi. Untuk memilah siapa saja yang termasuk sebagai wisman berdasarkan konsep tersebut, maka digunakan jenis visa yang dipakai bagi mereka yang berkewarganegaraan asing (WNA) dan jenis paspor bagi mereka warga negara Indonesia (WNI). Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia adalah wisman, karena WNA yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun sudah tercatat sebagai penduduk Indonesia. Sehingga apabila mereka ingin pergi ke negara asal mereka kemudian kembali lagi ke Indonesia, mereka tidak dicatat sebagai wisman saat kembali ke Indonesia. Dokumen yang mereka gunakan bukan visa tetapi *Exit Reentry Permit* (ERP) atau *Multiple Exit Reentry Permit* (MERP). Sebaliknya, tidak semua WNI yang datang dari luar negeri tidak termasuk sebagai wisman. Bagi mereka yang sudah tinggal di luar negeri lebih dari 1 (satu) tahun atau berniat untuk tinggal lebih dari 12 bulan, mereka dicatat sebagai wisman saat datang ke Indonesia.

Untuk mendeteksi mana yang sebagai penduduk luar negeri dan mana yang bukan, dari pencatatan laporan UPT Imigrasi mereka itu sudah dipisahkan dalam kelompok Penduduk Luar Negeri (Penlu/Pendul) bagi mereka yang menggunakan paspor biasa termasuk di dalamnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun TKI yang

bekerja di luar negeri pada saat datang ke Indonesia perlu dicermati kembali apakah mereka masih akan kembali ke luar negeri lagi atau tidak, karena apabila tidak seharusnya mereka sudah tidak masuk sebagai wisman. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan paspor dinas dan paspor diplomatik tidak dipisahkan antara mereka yang berdomisili di luar negeri atau di Indonesia. Untuk itu hanya digunakan perkiraan persentase (*rule of thumb*) bagi pemegang passport dinas 10 persennya adalah wisman dan bagi pemegang passport diplomatik 50 persennya adalah wisman. Besarnya persentase ini masih perlu dikaji kembali.

Sebagai dasar penghitungan devisa yang diterima melalui wisman, tidak hanya jumlah wisman nya saja, namun juga diperlukan rata-rata pengeluaran mereka selama di Indonesia. Untuk mendapatkan rata-rata pengeluaran ini diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan oleh Kemenbudpar.

Secara ideal penghitungan devisa pariwisata baik yang diterima maupun yang dikeluarkan seperti yang dilakukan dalam penghitungan ekspor dan impor barang melalui dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Setiap barang yang keluar masuk dari dalam dan luar negeri harus mengisi daftar PEB atau PIB yang mencantumkan jenis barang, volume dan nilai dari barang tersebut. Sedangkan pencatatan lalulintas manusia yang datang dan pergi dari dan ke luar negeri harus mengisi A/D card. A/D card tersebut harus diisi oleh setiap orang yang akan memasuki Indonesia, dimana isinya antara lain: kebangsaan, negara tempat tinggal, jenis kelamin, maksud kunjungan, dan jenis pekerjaan.

Tujuan utama dalam PES ini adalah untuk mengetahui rata-rata pengeluaran wisman selama di Indonesia menurut negara tempat

tinggal mereka, selain rata-rata lama tinggal mereka di Indonesia. Untuk melengkapi keakuratan hasil survei tersebut juga dilakukan studi mendalam ke biro-biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan paket inbound guna lebih mencermati distribusi pengeluaran wisman.

#### 2.3.4 Struktur Investasi Pariwisata

Investasi diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh benefit atau manfaat pada masa yang akan datang. Investasi dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dari informasi yang tersedia menunjukkan bahwa trend investasi menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang.

Dari studi empiris yang dilakukan di berbagai negara hampir dipastikan bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh pola dan struktur investasinya, bahkan juga sumber investasi tersebut apakah dari dana domestik atau dari luar negeri. Investasi dapat terbentuk karena terjadinya surplus usaha yang pada gilirannya kan membentuk tabungan yang merupakan sumber dana utama investasi.

Secara konsep investasi dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu **“investasi finansial”** dan **“investasi non-finansial”**. Investasi finansial lebih dititik beratkan pada investasi dalam bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, emas, tabungan, deposito, saham dan sejenisnya. Sedangkan investasi fisik lebih menekankan pada realisasi berbagai jenis investasi fisik seperti bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan sejenisnya. Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan

investasi dalam kaitannya dengan sektor pariwisata disini adalah investasi fisik saja.

Secara definitif yang dimaksud dengan investasi pariwisata adalah pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku investasi tersebut adalah produsen penghasil produk barang dan jasa, baik pemerintah, BUMN/BUMD maupun pihak swasta (termasuk rumah tangga).

Investasi fisik tersebut berupa pembuatan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal (hotel, kantor, tempat hiburan dan sebagainya), pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, kendaraan dan barang modal lainnya, termasuk juga perbaikan besar yang dilakukan guna meningkatkan kapasitas barang modal atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut.

Selanjutnya untuk mengukur besarnya investasi di sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut digunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diturunkan dari data PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Estimasi yang ada menunjukkan bahwa dari total investasi yang ada, sekitar 4-5 persen yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata. Investasi tersebut direalisasikan dalam bentuk berbagai jenis barang modal, diberbagai kegiatan ekonomi dan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber data utama yang digunakan dalam menyusun investasi pariwisata adalah data nilai penyediaan domestik maupun impor yang diturunkan dari tabel Input-Output 2005 dan PDB tahun 2010. Sebagai data banding digunakan data investasi yang dikompilasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam bentuk persetujuan

investasi berdasarkan fasilitas yang diberikan yang dibedakan menurut asal modal perusahaan, yaitu PMA dan PMDN.

Secara umum, pihak swasta paling banyak melakukan PMTB di sektor pariwisata pada jenis barang modal bangunan hotel dan akomodasi lainnya, sedangkan pemerintah tidak melakukan PMTB pada jenis barang modal tersebut. Selanjutnya PMTB berupa bangunan bukan tempat tinggal yang mencakup bangunan kantor, bangunan pabrik dan sebagainya merupakan jenis barang modal terbesar kedua yang dibentuk oleh swasta. Jenis barang modal alat angkutan serta bangunan restoran dan sejenisnya menempati urutan ketiga dan keempat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan PMTB terbesar pada jenis barang modal mesin dan peralatan. PMTB pada jenis barang modal alat angkutan merupakan PMTB terbesar kedua. Selain jenis barang modal bangunan, hotel dan akomodasi lainnya, pemerintah juga tidak melakukan PMTB pada jenis barang modal bangunan restoran dan sejenisnya serta bangunan lainnya.

### **2.3.5 Struktur Pengeluaran Lainnya Terkait Pariwisata**

Pengeluaran lainnya terkait pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, mencakup pengeluaran promosi, pembinaan serta pengeluaran lainnya yang bersifat non investasi atau modal. Pengeluaran ini terdiri dari pengeluaran promosi, periklanan pada kegiatan yang terkait dengan pariwisata seperti kegiatan perhotelan, restoran, industri pengolahan dan pertanian yang terkait dengan pariwisata, serta sektor jasa yang terkait dengan pariwisata. Secara garis besar pengeluaran ini akan tergambar dalam belanja barang dalam pengeluaran rutin pemerintah. Termasuk pula balas jasa dalam rangka pembinaan pegawai pemerintah yang bergerak di sektor

pariwisata yang tercermin dari belanja pegawai dari anggaran rutin pemerintah.

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan pengeluaran lainnya terkait pariwisata pemerintah berasal dari pengeluaran rutin APBN untuk pemerintah pusat dari Departemen Keuangan, serta pengeluaran rutin APBD seluruh Provinsi dan kabupaten/kota dari Bappenas. Dan dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat I seluruh Provinsi dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat II seluruh kabupaten/kota, serta Statistik Keuangan Pemerintah Desa K3 yang mencakup pengeluaran rutin dari pemerintahan desa yang berasal dari BPS. Disamping itu dipergunakan pula tabel I-O Indonesia tahun 2005 (Updating tahun 2008) dari BPS.

Pengeluaran pemerintah (*current expenditure*) dalam promosi dan pembinaan pariwisata adalah cerminan dari pelaksanaan sebagian besar anggaran rutin yang berasal dari APBN maupun APBD yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata beserta seluruh jajarannya, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pemerintah daerah tingkat I/Provinsi dan pemerintah daerah tingkat II/kabupaten/ kota, yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan. Jadi lingkup pengeluaran ini lebih luas dari lingkup investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dibicarakan sebelumnya.

## 2.4. Jenis-Jenis Tabel/Subneraca Nesparnas

Ada 10 (sepuluh) jenis tabel ikhtisar dan tabel subneraca yang digunakan sebagai bagian analisis dalam kerangka Nesparnas yang direkomendasikan oleh UNWTO. Tabel-tabel standar ini disusun sedemikian rupa agar kinerja sektor pariwisata dan posisinya dalam ekonomi makro daerah dapat dijelaskan secara terukur dan memadai. Namun demikian struktur tabel dalam Nesparnas ini berbeda dengan sepuluh tabel yang direkomendasikan oleh UNWTO, karena keterbatasan data di Indonesia dan adanya perbedaan klasifikasi dari produk pariwisata. Sebagai contoh data *same day visitors* tidak tersedia secara rinci. Berdasarkan hasil kajian data yang tersedia, tabel-tabel yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 1, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) menurut jenis-jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan negara asal

Tabel 2, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan nusantara menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan Provinsi asal (Tabel 2.a) serta Provinsi tujuan (Tabel 2.b)

Tabel 3, menggambarkan struktur pengeluaran wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri, menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan kategori pengeluarannya (yaitu pengeluaran dalam negeri berkaitan dengan *pre dan post-trip* dan pengeluaran di luar negeri berkaitan dengan *trip*-nya sendiri).

Tabel 4, merupakan penggabungan dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 yang menggambarkan struktur pengeluaran seluruh wisatawan (wisman, wisnus dan outbound) menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan jenis wisatawannya.

Tabel 5, (subneraca) menggambarkan tentang struktur input industri (sektor-sektor) yang terkait dengan pariwisata. Baris-baris pada subneraca ini menunjukkan input yang digunakan dalam suatu proses produksi yang dibagi

dalam dua jenis input yaitu: (a) berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sektor pariwisata sebagai input antara, dan (b) balas jasa faktor (nilai tambah) yang diciptakan oleh sektor pariwisata, atau disebut juga sebagai input primer. Subneraca ini lebih menggambarkan sebagai bagian dari suatu sistem produksi yang transaksinya diantaranya disajikan dalam tabel input-output. Dari tabel tersebut dapat dicerminkan keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan barang dan jasa dalam berbagai aktivitas ekonomi pariwisata.

Tabel 6, (subneraca), memperlihatkan struktur pembentukan modal tetap bruto (investasi fisik) yang merupakan bagian dari investasi yang direalisasikan untuk menunjang kegiatan pariwisata. Investasi fisik tersebut dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) maupun swasta (daerah dan asing) dalam bentuk bangunan hotel, restoran, mesin dan peralatan, alat angkutan, dan barang modal penunjang lainnya.

Tabel 7, (subneraca), menggambarkan jumlah pekerja yang terlibat pada industri pariwisata menurut sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata, yang dirinci menurut jenis kelamin

Tabel 8, (subneraca), memperlihatkan struktur pengeluaran pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha dalam promosi dan pembinaan sektor pariwisata (*current expenditure*), dirinci menurut jenis aktivitas yang dilakukan

Tabel 9, (sub-neraca), memperlihatkan peranan pariwisata dalam struktur PDB dan penyerapan tenaga kerja menurut sektor produksi (Neraca Produksi)

## **2.5. Model Pengukuran Dampak Pariwisata**

Pariwisata dengan segala aspeknya dapat memberikan dampak kepada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Secara ekonomi, dampak pariwisata menjadi potensi besar dalam penerimaan devisa negara dari konsumsi wisatawan mancanegara terhadap produk barang dan

jasa. Wisatawan nusantara tidak kalah pentingnya memberi porsi besar dalam penciptaan ekonomi daerah maupun regional.

Model Input-Output digunakan untuk mengukur dampak pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. Model ini didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi yang memiliki asumsi homogenitas (kesatuan output), proporsionalitas (hubungan linear input dan output) dan aditivitas. Model ini menggunakan Tabel Input Output (I-O) berupa suatu matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Kerangka dasar Tabel I-O menggambarkan transaksi produksi barang dan jasa yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama (kolom) menunjukkan struktur input sektor-sektor ekonomi, komposisi nilai tambah yang dihasilkan dan struktur permintaan akhir (*final demand*) terhadap barang dan jasa. Sisi kedua (baris) menunjukkan distribusi (alokasi) output barang dan jasa untuk proses produksi, *final demand* dan impor.

Tabel I-O yang digunakan dalam mengukur dampak pariwisata tahun 2010 adalah Tabel I-O 2005, yang di update tahun 2008. Beberapa masalah timbul karena sisi penyediaan (supply) pariwisata tidak sama dengan struktur yang ada di Tabel I-O. Perbedaan tersebut muncul karena hasil dari penghitungan pengeluaran wisatawan tidak dimanfaatkan dalam kompilasi tabel I-O sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan antara sisi permintaan dan penawaran.

Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja ekonomi daerah, permintaan akhir yang terdiri dari (1) pengeluaran wisnus, wisman dan pre dan post trip dari wisatawan Indonesia yang keluar negeri, (2) investasi sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dan (3) pengembangan dan promosi pariwisata oleh pemerintah dan swasta, menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Pengeluaran dari wisnus dan pre dan post trip wisatawan outbound adalah bagian dari

konsumsi rumahtangga, pengeluaran wisman merupakan bagian dari ekspor barang dan jasa, pengeluaran untuk investasi sektor pariwisata adalah bagian dari pembentukan modal tetap dan pengeluaran untuk promosi merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah sedangkan pengeluaran wisatawan Indonesia di luar negeri merupakan impor barang dan jasa.

Tabel 2.1. Input-Output Untuk Sistem Perekonomian dengan Tiga Sektor Produksi

Output Struktur Input			Permintaan Antara			Permintaan Akhir	Jumlah Output
			Sektor Produksi				
			1	2	3		
Input Antara	Sektor Produk	1	$x_{11}$	$x_{12}$	$x_{13}$	$F_1$	$X_1$
		2	$x_{21}$	$x_{22}$	$x_{23}$	$F_2$	$X_2$
		3	$x_{31}$	$x_{32}$	$x_{33}$	$F_3$	$X_3$
Input Primer			$V_1$	$V_2$	$V_3$		
Jumlah Input			$X_1$	$X_2$	$X_3$		

Dalam pengukuran dampak pariwisata tersebut, masing-masing struktur pengeluaran dari permintaan akhir tersebut diklasifikasikan kembali

mengikuti klasifikasi sektor dari I-O dan dampaknya diperoleh dengan mengalikannya dengan koefisien multiplier Leontief (dikenal dengan matriks A).

Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja ekonomi daerah, permintaan akhir menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata, faktor pendorong (*exogenous variable*) berupa konsumsi wisatawan mancanegara (*inbound*), wisatawan nusantara (wisnus), wisatawan Indonesia ke luar negeri (*outbound*) terhadap produk dalam negeri, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pariwisata (APBN) serta lembaga-lembaga nirlaba yang ikut andil dalam kegiatan pariwisata. Dengan model IO dampak kepariwisataan dapat dihasilkan sebagai berikut:

### 1. Dampak Terhadap Output

Pengeluaran konsumsi pariwisata akan berdampak terhadap penciptaan nilai produksi barang dan jasa sektoral. Hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan nilai output dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$X_i = (I-A^d)^{-1} \cdot C_i \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

- $X_i$  = output yang diciptakan akibat konsumsi kepariwisataan.
- $(I-A^d)^{-1}$  = invers matriks berfungsi sebagai koefisien regresi dalam model.
- $C_i$  = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound, 3) wisnus, 4) investasi pariwisata dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata.
- $i$  = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (1) mendasarkan hubungan linier antara permintaan akhir, dalam hal ini konsumsi pariwisata dengan output. Semakin besar jumlah permintaan terhadap produk barang dan jasa maka output yang harus disediakan harus bertambah mengikuti matriks pengganda sebagai koefisien regresinya. Persamaan di atas menghasilkan nilai output barang dan jasa setiap sektor akibat dari konsumsi pariwisata. Dapat diketahui dampak output akibat masing-masing komponen konsumsi pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi. Misalkan, pengeluaran wisman di Indonesia akan berdampak terhadap penambahan nilai produksi barang dan jasa. Demikian pula akibat adanya aktifitas wisnus, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pengembangan pariwisata akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

## 2. Dampak Terhadap Nilai Tambah Bruto (Produk Domestik Bruto)

Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai output sektor ekonomi. Sebagai balas jasa atas faktor produksi, nilai tambah bruto mencakup upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tak langsung dan subsidi. Sebagaimana model I-O untuk menghasilkan nilai output akibat konsumsi pariwisata, nilai tambah yang diciptakan juga berbanding lurus dengan permintaan atau konsumsi kepariwisataan. Formulasi yang menunjukkan hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_i &= v (I-A^d)^{-1} \cdot C_i \\ &= v \cdot X_i \quad \dots\dots\dots(2) \end{aligned}$$

dimana:

- $V_i$  = nilai tambah bruto karena dampak konsumsi kepariwisataan.
- $v$  = matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto, yaitu rasio antara nilai tambah bruto sektor tertentu dengan outputnya.

- $C_i$  = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound, 3) wisnus, 4) investasi pariwisata dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata
- $i$  = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (2) menunjukkan hubungan searah antara nilai tambah bruto dengan nilai outputnya. Ini juga berarti bahwa terdapat hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan penciptaan nilai tambah sektor ekonomi, yaitu pengeluaran wisman, wisnus, investasi pariwisata dan lainnya.

### 3. Dampak Terhadap Upah/Gaji dan Pajak Tak Langsung

Salah satu komponen nilai tambah bruto adalah upah/gaji dan pajak tak langsung. Dari model I-O dapat diturunkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepariwisataan. Hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_{ji} &= v_j (I-A^d)^{-1} \cdot C_i \\ &= v_j \cdot X_i \end{aligned} \quad \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

- $V_{ji}$  = Upah/gaji dan pajak tak langsung akibat konsumsi kepariwisataan.
- $v_j$  = matriks diagonal koefisien upah/gaji dan pajak tak langsung, yaitu rasio antara upah/gaji dan pajak tak langsung sektor tertentu dengan outputnya.
- $j$  = 1) upah dan gaji, 2) pajak tak langsung.
- $C_i$  = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound, 3) wisnus, 4) investasi pariwisata dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata
- $i$  = 1, 2, 3, 4, 5.

Persamaan (3) ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsumsi kepariwisataan dengan upah/gaji para pekerja sektor-sektor ekonomi dan penerimaan pajak bagi pemerintah dari aktivitas ekonomi tersebut.

#### 4. Dampak Terhadap Kesempatan Kerja

Dalam setiap aktivitas ekonomi dan produksi, dibutuhkan sejumlah faktor produksi, diantaranya yang penting adalah tenaga kerja. Dalam hubungan yang sederhana, setiap unit produk yang dihasilkan akan membutuhkan input tenaga kerja. Dengan demikian, pengeluaran wisatawan terhadap barang dan jasa akan dapat dihitung pula dampaknya pada kesempatan kerja. Hubungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L_i &= l (I-A^d)^{-1} \cdot C_i \\ &= l \cdot X_i \quad \dots\dots\dots(4) \end{aligned}$$

dimana:

- $L_i$  = Jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh konsumsi kepariwisataan.
- $l$  = matriks diagonal koefisien tenaga kerja, yaitu rasio antara jumlah tenaga kerja sektor tertentu terhadap outputnya.
- $C_i$  = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound, 3) wisnus, 4)investasi pariwisata dan 5) pengeluaran pemerintah untuk pariwisata.
- $i$  = 1, 2, 3, 4, 5.

# **BAB 3**

# **STRUKTUR TENAGA KERJA**

## BAB III

### STRUKTUR TENAGA KERJA

Semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, selain harus diimbangi dengan jumlah sarana dan prasarana yang memadai, juga harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan selain dipengaruhi oleh jumlah fasilitas (sisi supply), juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja khususnya yang melayani mereka secara langsung terhadap permintaan wisatawan, seperti perhotelan, usaha objek daya tarik wisata, dan restoran. Tenaga kerja yang profesional sangat dibutuhkan dalam bidang pariwisata, karena sangat terkait dengan pelayanan terhadap wisatawan.

#### 3.1. Struktur Tenaga Kerja Perhotelan

Pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja oleh hotel-hotel berbintang yang tersebar di 33 propinsi mencapai 59,75 persen dari total tenaga kerja yang terserap pada usaha akomodasi di Indonesia. Sedangkan sisanya sebesar 40,25 persen diserap oleh usaha akomodasi lainnya.

Ditinjau menurut jenis pekerjaan, sebagian besar pekerja usaha akomodasi hotel bintang bekerja sebagai pekerja teknis dan pekerja penyelia masing-masing sebesar 26,04 persen dan 12,49 persen dari total pekerja. Sementara itu untuk akomodasi lainnya, pekerja terbanyak sebagai tenaga kerja teknis (20,19 persen) dan administrasi (11,37 persen). Sedangkan untuk pekerja lainnya seperti *room boy*, *resepsionis*, *cleaning service* dan pekerja lainnya merupakan yang terbesar untuk kedua jenis akomodasi tersebut, karena memang mereka merupakan pelaksana langsung di lapangan.

Tabel 3.1. Struktur Pekerja pada Usaha Akomodasi menurut Jenis Pekerjaan,  
Tahun 2013

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Hotel bintang</b>	<b>Akomodasi Lainnya</b>
(1)	(2)	(3)
Direktur	1,12	4,97
Manajer	4,94	7,86
Asisten Manajer	3,86	2,02
Penyelia	12,49	4,47
Teknis	26,04	20,19
Administrasi	8,45	11,37
Lainnya	43,09	49,13
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya, BPS.

Selanjutnya, untuk meningkatkan jumlah tamu yang menginap di hotel, profesionalisme di bidang perhotelan mutlak diperlukan. Peningkatan mutu layanan hotel terus dilakukan, baik melalui pembinaan yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh para pengusaha hotel itu sendiri. Peningkatan mutu pendidikan tenaga kerja pada lembaga pendidikan khusus kejuruan hotel/pariwisata merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh. Pekerja berpendidikan kejuruan hotel/pariwisata relatif kecil bila dibandingkan dengan pekerja berpendidikan lainnya. Dari total pekerja tersebut di atas, sebanyak 82.368 orang (26,79 persen) yang bekerja pada usaha akomodasi menyatakan tamat pendidikan kejuruan hotel/pariwisata, sedangkan sisanya sebanyak 225.100 orang (73,21 persen) tamat pendidikan non kejuruan pariwisata.

Dilihat menurut jenis kelamin, jumlah pekerja laki-laki pada usaha akomodasi lebih banyak dibanding jumlah pekerja perempuan. Tenaga kerja di usaha akomodasi sampai saat ini masih didominasi oleh pekerja laki-laki yaitu

73,58 persen di hotel bintang, sedangkan di usaha akomodasi lainnya mempunyai peran 68,24 persen dari total pekerja usaha akomodasi lainnya.

Sedangkan jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pekerja hotel berbintang terbanyak berpendidikan SMA, baik untuk pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Suatu hal yang menarik dari data tersebut adalah untuk pekerja yang tamat pendidikan tinggi pada kelompok perempuan lebih tinggi dibanding porsi pekerja berpendidikan tinggi pada kelompok laki-laki. Sebagai contoh persentase perempuan yang menamatkan pendidikan Diploma I/II/III sebesar 29,29 persen, sedangkan pada kelompok laki-laki sebesar 24,57 persen. Demikian pula untuk tingkat pendidikan universitas, pada pekerja perempuan mencapai 13,81 persen, sedangkan pada kelompok laki-laki hanya mencapai 9,13 persen.

Tabel 3.2. Struktur Pekerja pada Usaha Hotel Berbintang menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Universitas	9,13	13,81	10,37
Diploma I/II/III	24,57	29,29	25,82
SMA	60,87	52,91	58,76
≤ SMP	5,43	3,99	5,05
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya, BPS.

Sedikit berbeda dengan struktur tenaga kerja di hotel berbintang, pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya, tenaga kerja berpendidikan sampai dengan SMP masih cukup besar porsinya, baik untuk tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, yaitu masing-masing 22,15 persen dan 26,93 persen. Dan

yang berpendidikan Sarjana ke atas masih sangat sedikit jumlahnya. Tenaga kerja di usaha akomodasi lainnya juga masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SMA.

Tabel 3.3. Struktur Pekerja pada Usaha Akomodasi Lainnya Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Universitas	6,15	7,59	6,61
Diploma I/II/III	6,94	8,39	7,40
SMA	64,76	57,10	62,33
≤ SMP	22,15	26,93	23,67
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya, BPS.

### 3.2. Struktur Tenaga Kerja Usaha Objek Daya Tarik Wisata

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa salah satu hasil yang diharapkan dari penyusunan Nesparnas tahun 2013 adalah tersedianya data mengenai tenaga kerja sektor pariwisata terkait. Melalui Survei Usaha Objek Daya Tarik Wisata, juga diperoleh data ketenagakerjaan terkait kegiatan usaha pengelolaan obyek daya tarik wisata (DTW). Cakupan survei yang dilakukan adalah usaha DTW yang dioperasikan secara komersial dan dilakukan secara sensus. Tabel di bawah menyajikan hasil survei tersebut.

Tabel 3.4. Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Obyek Daya Tarik Wisata menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2013

<b>Status Pekerja</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tetap	11,25	4,06	15,31
Tidak Tetap	7,67	2,33	10,01
<b>Jumlah</b>	<b>18,93</b>	<b>6,39</b>	<b>25,32</b>

Sumber : Statistik Obyek Daya Tarik Wisata, BPS

Berdasarkan Tabel 3.4. di atas, dapat dilihat bahwa dari sebanyak 1.759 usaha DTW, rata-rata mampu menyerap pekerja berkewarganegaraan Indonesia sebanyak 25 orang per usaha. Ditinjau berdasarkan gender, tenaga kerja laki-laki lebih dominan dibanding tenaga kerja perempuan, Berbicara mengenai status pekerja, sebagian besar pekerja merupakan pekerja tetap.

Pendidikan maupun keahlian dari seorang pekerja sangat diperlukan untuk menempati jenjang maupun posisi suatu pekerjaan. Pada tabel 3.5 dapat dilihat tingkat pendidikan dari pekerja pada usaha objek daya tarik wisata. Dari hasil Survei Objek Daya Tarik Wisata, diketahui bahwa sebagian besar pekerja berpendidikan SMA, yaitu rata-rata 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan per usaha. Sementara itu pekerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi masih sedikit jumlahnya, dan biasanya mereka menempati posisi-posisi puncak.

Dalam kaitan dengan isu gender, ternyata pekerja berpendidikan setingkat diploma ke atas, tidak memiliki perbedaan rata-rata jumlah pekerja yang signifikan pada usaha objek daya tarik wisata, porsi pekerja perempuan hampir sama dengan pekerja laki-laki. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan sekarang telah menikmati tingkat pendidikan yang sama dengan

laki-laki. Dengan kata lain, kesempatan dalam menikmati pendidikan antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan lagi.

Tabel 3.5. Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Obyek Daya Tarik Wisata menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
(1)	(2)	(3)
Universitas	1,58	0,94
Diploma I/II/III	0,70	0,48
SMA	11,70	3,90
≤ SMP	4,96	1,07
<b>Jumlah</b>	<b>18,93</b>	<b>6,39</b>

Sumber: Statistik Obyek Daya Tarik Wisata, BPS

### 3.3. Struktur Tenaga Kerja Usaha Restoran/Rumah Makan

Jenis usaha lain yang juga terkait erat dengan kegiatan pariwisata adalah usaha restoran/rumah makan. Di dalam melakukan perjalanan, seseorang pasti akan membutuhkan konsumsi untuk menunjang perjalanannya. Kebutuhan wisatawan tersebut dapat dipenuhi, salah satunya oleh usaha penyediaan makan minum yaitu usaha restoran/rumah makan. Usaha restoran/rumah makan yang dicakup dalam survei ini adalah usaha yang berskala menengah dan besar.

Tabel 3.6. Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Restoran/Rumah makan menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2013

<b>Status Pekerja</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tetap	12,66	7,06	19,72
Tidak Tetap	3,30	2,06	5,36
<b>Jumlah</b>	<b>15,96</b>	<b>9,12</b>	<b>25,08</b>

Sumber: Statistik Restoran/Rumah makan, BPS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha restoran/rumah makan secara rata-rata adalah 25 orang per usaha, yang mencakup pekerja berkewarganegaraan Indonesia. Bila dilihat menurut jenis kelamin, tenaga kerja laki-laki lebih banyak terserap dalam usaha restoran ini, dengan rata-rata pekerja sebanyak 16 orang per usaha, sedangkan pekerja perempuan rata-rata hanya mencapai 9 orang per usaha. Sebagian besar pekerja laki-laki ini diperlukan terutama untuk bagian dapur atau sebagian besar dari mereka sebagai tukang masak, terutama untuk restoran-restoran berskala besar.

Dalam hal mempekerjakan tenaga asing, seperti halnya pada usaha objek daya tarik wisata, jumlah pekerja asing pada usaha restoran/ rumah makan ini juga relatif masih sangat sedikit jumlahnya. Indikasi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga asing, dengan kata lain dalam mengoperasikan kedua jenis usaha ini, tenaga kerja Indonesia sangat mampu.

Selanjutnya dilihat dari status pekerja, sebagian besar dari pekerja merupakan pekerja tetap, dimana rata-rata pekerja tetap adalah sebanyak 20 orang per usaha, sedangkan pekerja tidak tetap 5 orang per usaha. Status

pekerja ini sangat berpengaruh terhadap kondisi pekerja, karena dengan status yang tetap, pekerja mendapat kompensasi yang tetap setiap bulannya.

Berbicara berdasarkan pendidikan pekerja, seperti halnya pada usaha objek daya tarik wisata, sebagian besar pekerja pada usaha restoran/rumah makan adalah berpendidikan SMA dan sederajat, dimana rata-rata pekerja laki-laki sebesar 13 orang per usaha, dan pekerja perempuan 7 orang per usaha.

Tabel 3.7. Rata-rata Pekerja WNI pada Usaha Restoran/Rumah Makan menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2013

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
(1)	(2)	(3)
Universitas	0,48	0,34
Diploma I/II/III	0,86	0,56
SMA	13,12	7,34
≤ SMP	1,80	1,06
<b>Jumlah</b>	<b>16,26</b>	<b>9,31</b>

Sumber: Statistik Restoran/Rumah Makan, BPS

Pekerja dengan pendidikan Diploma dan yang lebih tinggi masih sedikit jumlahnya pada usaha ini. Hal ini dikarenakan sifat usaha ini yang lebih membutuhkan skill/keterampilan khusus dalam pengoperasian usaha, terutama mereka yang terampil dalam ilmu yang berkaitan dengan tata boga. Selanjutnya, dilihat dari jenis kelamin, dominasi pekerja laki-laki pada usaha juga terjadi pada seluruh jenjang pendidikan.

## **BAB 4**

# **STRUKTUR PENGELUARAN WISATAWAN DAN INVESTASI PARIWISATA**

## BAB IV

### STRUKTUR PENGELUARAN WISATAWAN DAN INVESTASI PARIWISATA

Pendekatan yang digunakan untuk melihat dampak kegiatan pariwisata terhadap perekonomian adalah menggunakan analisis dampak dengan model input-output. Terkait dengan hal tersebut, dampak ekonomi pariwisata yang diciptakan sangat tergantung pada beberapa hal yang berkaitan dengan: (1) struktur pengeluaran wisatawan dan besarnya, (2) struktur investasi pariwisata dan kontribusinya dalam investasi nasional, (3) struktur pengeluaran untuk promosi pariwisata, dan (4) struktur pekerja dan kontribusinya terhadap pekerja nasional.

#### 4.1. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Seiring kondisi perekonomian yang terus tumbuh, diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mampu membelanjakan sebagian penghasilannya untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok, salah satunya untuk melakukan perjalanan wisata. Jumlah perjalanan wisnus pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 250,04 juta dari 245,29 juta pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 1,94 persen. Jumlah perjalanan tersebut terbesar berasal dari Jawa Barat yaitu 45,0 juta perjalanan, diikuti Jawa Timur 41,31 juta perjalanan. Jumlah perjalanan ini sejalan dengan jumlah penduduk di kedua provinsi ini yang memang besar.

Bila dilihat *travel balance* menurut provinsi, jumlah perjalanan wisnus yang masuk ke suatu provinsi tidak berbeda jauh dengan mereka yang keluar dari provinsi tersebut. Pola ini juga terjadi pada daerah-daerah yang jumlah penduduknya relatif besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah wisnus yang berkunjung maupun yang keluar juga proporsional.

Tabel 4.1. Jumlah Perjalanan Wisnus di Indonesia, Tahun 2009-2013  
(ribu perjalanan)

<b>Tahun</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Jumlah perjalanan	229.730	234.377	236.752	245.290	250.036

Sumber: BPS

Berdasarkan data jumlah wisnus yang keluar dan masuk, maka setiap Provinsi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu (1) Provinsi yang secara konsisten mempunyai *travel balance* positif seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, artinya jumlah wisnus yang berkunjung ke provinsi ini lebih tinggi dari jumlah wisnus yang berasal dari provinsi bersangkutan, (2) Provinsi yang mempunyai *travel balance* negatif seperti DKI Jakarta dan beberapa provinsi di Indonesia Timur, artinya jumlah wisnus yang berkunjung ke provinsi ini lebih rendah dari jumlah wisnus yang berasal dari provinsi bersangkutan, dan (3) Provinsi yang mempunyai *travel balance* tidak tetap, seperti Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Perjalanan wisnus ke suatu daerah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sehingga perjalanan wisnus selain ikut memperkenalkan budaya daerah kepada wisatawan, juga bisa merupakan sarana pemerataan pendapatan antar daerah. Dari 250,04 juta perjalanan wisnus pada tahun 2013, jumlah pengeluaran konsumsinya mencapai Rp 177,84 trilyun atau rata-rata pengeluaran per perjalanan mencapai Rp 711,3 ribu. Bagian terbesar pengeluaran ini digunakan untuk angkutan domestik, yaitu 41,96 persen, sementara pengeluaran untuk akomodasi hanya mencapai 10,84 persen. Ini mengindikasikan bahwa penduduk Indonesia yang

### Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

melakukan perjalanan domestik banyak yang tidak menggunakan jasa akomodasi komersial, mereka lebih senang menginap di rumah teman, kenalan, atau keluarganya.

Sementara pengeluaran untuk makanan dan minuman mencapai 19,45 persen dari total pengeluaran, dan pengeluaran untuk belanja mencapai 11,75 persen. Sementara itu, pengeluaran wisnus yang paling kecil adalah untuk biro perjalanan dan pramuwisata, dan kegiatan kesehatan dan kecantikan yang masing-masing sebesar 1,88 persen dan 0,04 persen dari total pengeluaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar tujuan utama wisnus melakukan perjalanan adalah untuk mengunjungi keluarga atau bersilaturahmi.

Tabel 4.2. Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2013 (miliar rupiah)

Jenis Produk	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Hotel dan akomodasi	19.276,54	10,84
2. Restoran dan sejenisnya	34.587,73	19,45
3. Angkutan domestik	74.622,16	41,96
4. Biro perjalanan, operator & pramuwisata	3.350,08	1,88
5. Jasa seni budaya, rekreasi & hib	4.998,17	2,81
6. Jasa pariwisata lainnya	7.732,99	4,35
7. Souvenir	6.907,36	3,88
8. Kesehatan dan kecantikan	76,99	0,04
9. Produk industri non makanan	20.896,49	11,75
10. Produk pertanian	5.392,11	3,03
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>177.840,61</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS

## Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

Selanjutnya Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 memperlihatkan struktur pengeluaran wisnus menurut Provinsi asal dan tujuan. Bagi provinsi yang menerima kunjungan, maka seluruh pengeluaran wisnus di provinsi tersebut merupakan “devisa” yang diperoleh dari luar provinsi. Namun apabila wisnus hanya melakukan perjalanan dalam provinsi di mana mereka tinggal, maka pengeluarannya hanya berdampak pada sektor usaha di provinsi itu sendiri.

Tabel 4.3. Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Asal, Tahun 2013 (miliar rupiah)

<b>Provinsi Asal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Distribusi (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Sumatera Utara	3.327,1	1,87
2. Sumatera Barat	3.107,6	1,75
3. DKI Jakarta	16.512,4	9,28
4. Jawa Barat	20.612,0	11,59
5. Jawa Tengah	10.907,0	6,13
6. DI Yogyakarta	2.577,8	1,45
7. Jawa Timur	18.931,2	10,65
8. Bali	3.362,9	1,89
9. Sulawesi Utara	2.399,8	1,35
10. Sulawesi Selatan	4.687,9	2,64
11. Lainnya	91.414,9	51,40
<b>INDONESIA</b>	<b>177.840,61</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS

Pengeluaran wisnus terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, mencapai 11,59 persen dari total belanja, diikuti Jawa Timur dan DKI Jakarta, masing-masing 10,65 persen dan 9,28 persen. Sementara itu konsumsi wisnus dari Jawa Tengah mencapai 6,13 persen.

Tabel 4.4. Struktur Pengeluaran Wisnus Menurut Provinsi Tujuan,  
Tahun 2013 (miliar rupiah)

<b>Provinsi Tujuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Distribusi (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Sumatera Utara	6.596,32	3,71
2. Sumatera Barat	3.062,88	1,72
3. DKI Jakarta	41.920,90	23,57
4. Jawa Barat	26.915,91	15,13
5. Jawa Tengah	20.305,31	11,42
6. DI Yogyakarta	10.499,72	5,90
7. Jawa Timur	22.176,09	12,47
8. Bali	6.767,07	3,81
9. Sulawesi Utara	2.710,24	1,52
10. Sulawesi Selatan	7.072,88	3,98
11. Lainnya	29.813,29	16,76
<b>INDONESIA</b>	<b>177.840,61</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS

Berbeda dengan provinsi asal wisnus, provinsi dengan penerimaan terbesar dari perjalanan domestik adalah DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat dan Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut masing-masing menerima kontribusi 23,57 persen, 15,13 persen, dan 12,47 persen dari total pengeluaran wisnus. Hal ini dapat dilihat dari struktur pengeluaran wisnus menurut provinsi tujuan seperti disajikan pada Tabel 4.3.b. Provinsi yang mendapat “devisa” cukup besar masih berlokasi di Pulau Jawa dengan jumlah wisnus yang besar.

Hal ini wajar karena jumlah penduduk di pulau ini merupakan yang terbesar. Selain itu, struktur ini juga menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih merupakan daerah tujuan wisata bagi penduduk Indonesia. Sementara itu Bali yang merupakan daerah wisata tujuan bagi wisman, ternyata tidak demikian

halnya bagi wisnus. Proporsi pendapatan dari wisnus di Provinsi Bali hanya 3,81 persen dari total pengeluaran wisnus, jauh lebih rendah dari DKI Jakarta yang sebesar 23,57 persen.

#### **4.2. Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara**

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman, sudah barang tentu akan memberikan arti yang lebih baik bagi perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat konsumsi wisman merupakan peranan kedua yang signifikan dalam struktur pengeluaran pariwisata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pencatatan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh Indonesia, jumlah kunjungan wisman di tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisman mencapai 8,80 juta orang. Jumlah ini naik 9,42 persen dibandingkan dengan jumlah wisman tahun 2012 yang sebanyak 8,04 juta orang. Naiknya jumlah wisman tahun 2013 ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam (*internal factors*) maupun luar (*external factors*).

Tabel 4.5. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Indonesia Menurut Negara Tempat Tinggal, Tahun 2009-2013

<b>Negara Tempat Tinggal</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Singapura	1.272.862	1.373.126	1.505.588	1.565.478	1.634.149
Malaysia	1.179.366	1.277.476	1.302.237	1.335.531	1.430.989
Jepang	475.766	418.971	412.623	450.687	491.574
T a i w a n	203.239	213.442	221.877	216.535	245.288
Australia	584.437	771.792	931.109	961.595	997.984
Korea, Rep.	256.522	274.999	306.061	311.618	343.627

### Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

Amerika Serikat	170.231	180.361	204.275	212.851	234.134
Jerman	128.649	145.244	145.160	148.146	168.110
Inggris	169.271	192.259	192.685	212.087	228.679
Belanda	143.485	151.836	159.063	146.591	158.181
China	395.013	469.365	574.179	686.779	807.429
Lainnya	1.344.889	1.534.073	1.694.874	1.796.564	2.061.985
<b>Jumlah</b>	<b>6.323.730</b>	<b>7.002.944</b>	<b>7.649.731</b>	<b>8.044.462</b>	<b>8.802.129</b>

Sumber: BPS

Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 jumlah kunjungan terbanyak berasal dari Singapura yang mencapai 1,63 juta orang atau 18,57 persen, kemudian urutan kedua diikuti oleh wisman asal Malaysia dan Australia dengan kontribusi masing-masing sebesar 16,26 persen dan 11,34 persen. Kedekatan geografis secara umum menjadi faktor utama besarnya jumlah wisman dari negara-negara tersebut. Wisman asal Singapura jumlahnya secara konsisten tetap terbesar sejak tahun 1999. Sementara itu wisman asal Malaysia pada tahun ini meningkat cukup tajam, hampir menyamai wisman asal Singapura. Disamping faktor geografis, kedatangan jumlah wisman asal Malaysia ini juga disebabkan karena faktor hubungan historis sesama rumpun melayu. Selanjutnya wisman asal Australia yang tahun sebelumnya menempati urutan ketiga terbesar, dalam tahun ini masih di urutan yang sama. Hal yang menarik untuk diamati adalah peningkatan jumlah wisman yang berasal dari China yang mencapai 807.429 orang. Dibanding keadaan 5 tahun yang lalu, jumlah wisman yang berasal dari China mengalami peningkatan dua kali lipat lebih. Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan semakin terbukanya sistem politik dan ekonomi China menyebabkan jumlah perjalanan penduduknya ke luar negeri semakin tinggi.

Pada tahun 2013 total konsumsi wisman di Indonesia mencapai Rp 112,22 triliun. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2012 yang berjumlah Rp 87,83 triliun, konsumsi wisman tahun 2013 mengalami peningkatan yang

## Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

cukup signifikan. Peningkatan jumlah konsumsi wisman ini disebabkan selain karena kenaikan jumlah kunjungan wisman juga karena meningkatnya rata-rata konsumsi/belanja wisman di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kunjungan meningkat dari US\$ 1.134 pada tahun 2012 menjadi US\$ 1.142 pada tahun 2013.

Berbeda dengan struktur pengeluaran pada wisnus, pengeluaran wisman terbesar adalah untuk hotel dan akomodasi yaitu 48,91 persen dari total pengeluaran, diikuti pengeluaran untuk restoran dan souvenir/cinderamata masing-masing 17,67 persen dan 7,87 persen. Sebaliknya porsi pengeluaran wisman yang terkecil adalah untuk konsumsi jasa pariwisata lainnya yang hanya 1,25 persen dari total pengeluaran. Demikian pula halnya wisman dengan tujuan kesehatan dan kecantikan, yang masih kecil persinya, Hal ini karena memang wisman yang datang ke Indonesia dengan tujuan kesehatan/berobat dan kecantikan sangat kecil jumlahnya disebabkan Indonesia belum merupakan daerah tujuan wisata kesehatan seperti halnya Malaysia dan Singapura.

Tabel 4.6. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2013 (miliar rupiah)

<b>Jenis Produk</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Distribusi (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Hotel dan akomodasi	54.884,78	48,91
2. Restoran dan sejenisnya	19.827,73	17,67
3. Angkutan domestik	9.814,08	8,75
4. Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	2.982,93	2,66
5. Jasa seni budaya, rekreasi & hiburan	5.504,76	4,91

### Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

6. Jasa pariwisata lainnya	911,76	0,81
7. Souvenir	8.827,36	7,87
8. Kesehatan dan kecantikan	2.282,41	2,03
9. Produk industri non makanan	5.788,41	5,16
10. Produk pertanian	1.400,18	1,25
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>112.224,40</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kementerian Pariwisata, diolah kembali

Sementara pengeluaran wisman untuk transportasi dari negara asalnya ke Indonesia dan sebaliknya yang menggunakan maskapai Indonesia mencapai Rp. 17,52 triliun. Angkutan udara mempunyai share tertinggi mencapai 97,01 persen. Sehingga total devisa yang masuk ke Indonesia karena kedatangan wisman mencapai Rp. 129,75 triliun.

Tabel 4.7. Pengeluaran Wisman untuk Angkutan Internasional Indonesia Menurut Jenis Angkutan, Tahun 2013 (miliar rupiah)

Moda Angkutan	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Udara	16.996,97	97,01
2. Air	22,81	0,13
3. Darat	501,64	2,86
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>17.521,41</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kementerian Pariwisata, diolah kembali

#### 4.3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri (Wisnas)

Selama lima tahun terakhir, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke mancanegara (wisnas) menunjukkan trend peningkatan. Disamping adanya peningkatan kemampuan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita penduduk sekitar 5 persen per tahun, hal lain yang ikut mempengaruhi penduduk Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri antara lain faktor kenyamanan dan keamanan di negara yang dikunjungi, serta harga perjalanan yang harus dibayar. Dengan berkembangnya perang tarif antar maskapai penerbangan serta gencarnya promosi dari negara-negara lain, terutama negara tetangga (ASEAN), menjadi pemicu penduduk Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dilihat dari sisi neraca pembayaran sektor jasa, dalam hal ini komponen *travel* (pariwisata), masih mengalami *surplus* hingga akhir tahun ini. Namun demikian seiring meningkatnya jumlah perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri, dikhawatirkan *surplus* itu akan semakin berkurang dan dapat menjadi *balance* ataupun negatif. Pada tahun 2013, jumlah kunjungan wisnas mencapai 8,03 juta kunjungan atau naik 7,66 persen dibanding tahun 2012. Dari sisi pengeluaran atau konsumsi hingga tahun 2013, total pengeluaran wisman masih lebih tinggi dibanding wisnas, sehingga devisa yang dihasilkan masih bernilai positif (*surplus*).

Tabel 4.8. Jumlah Perjalanan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri, Tahun 2009-2013 (ribu perjalanan)

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah perjalanan	5.053	6.236	6.750	7.454	8.025

Sumber: BPS

## Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

Dari hasil *survey outbound*, wisnas terbanyak berkunjung ke negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura. Meningkatnya jumlah kunjungan ke kedua negara tersebut karena selain kedekatan geografis juga karena menariknya promosi dari kedua negara tersebut, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Dengan demikian semakin banyak penduduk Indonesia, khususnya dari wilayah Sumatera yang pergi berobat ke Malaysia maupun Singapura. Sementara itu dari sisi konsumsi wisatawan Indonesia yang ke luar negeri, perencanaan dan persiapan dalam melakukan perjalanan biasanya dibuat jauh hari sebelum perjalanan tersebut dilakukan. Terlebih lagi perjalanan ke luar negeri, yang harus dibekali dengan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa.

Tabel 4.9. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri Menurut Kategori Pengeluaran dan Jenis Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi, Tahun 2013 (miliar rupiah)

Jenis Produk	Kategori Pengeluaran			Jumlah	Dist (%)
	Pre-Trip	Trip	Post-Trip		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Hotel dan akom. lain	50,80	26.579,37	23,93	26.654,11	30,43
2. Rest.& sejenisnya	568,01	12.072,05	267,61	12.907,67	14,73
3. Angkutan	816,02	5.402,20	384,45	6.602,67	7,54
4. BPW, Pramuwisma	1.093,22	857,49	515,05	2.465,76	2,81
5. Jasa seni, budaya	-	2.046,67	-	2.046,67	2,34
6. Jasa Par. Lainnya	-	3.070,01	-	3.070,01	3,50
7. Souvenir	-	6.107,01	-	6.107,01	6,97
8. Kesehatan & Kecantikan	-	8.133,19	-	8.133,19	9,28
9. Prod. non makanan	1.472,03	16.424,82	693,52	18.590,37	21,22

### Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

10. Produk pertanian	-	1.026,53	-	1.026,53	1,17
<b>Jumlah</b>	<b>4.000,08</b>	<b>81.719,35</b>	<b>1.884,56</b>	<b>87.604,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kementerian Pariwisata, diolah kembali

Dalam analisis ini sebenarnya pengeluaran wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak hanya uang yang mereka belanjakan di luar negeri saja (merupakan pengurang devisa) tetapi juga uang yang mereka belanjakan di Indonesia baik sebelum maupun sesudah mereka kembali ke Indonesia tetapi masih dalam rangkaian perjalanan mereka ke luar negeri. Memang secara keseluruhan biaya sebelum meninggalkan Indonesia (*pre-trip*) dan sesudah tiba di Indonesia (*post-trip*) yang dikeluarkan relatif kecil, yaitu masing-masing 4,57 persen dan 2,15 persen dari total pengeluaran mereka yang mencapai Rp 87,60 triliun.

Dilihat dari keseluruhan pengeluaran yang mereka lakukan, porsi terbesar adalah untuk akomodasi, yaitu 30,43 persen. Sementara itu untuk keperluan makan/minum di restoran dan sejenisnya, mereka mengeluarkan dana sekitar 14,73 persen dari total pengeluarannya. Sedangkan untuk keperluan kesehatan dan kecantikan mereka mengeluarkan uang dengan porsi 9,28 persen.

#### 4.4. Struktur Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Investasi Pariwisata

Untuk mengukur besarnya investasi di sektor pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diturunkan dari data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2013. Dalam pemahaman PDB, investasi dimaksud juga sebagai PMTB. Dari data tersebut terlihat bahwa total investasi swasta yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata adalah sebesar 4,22 persen dari total investasi yang berjumlah sebesar Rp 2.876,25 triliun. Investasi

### Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

pariwisata ini terdiri dari investasi oleh dunia usaha atau swasta sebesar Rp 121,0 triliun atau sebesar 99,76 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,24 persen dilakukan oleh pemerintah atau senilai Rp 0,30 triliun.

Tabel 4.10. Struktur Investasi Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung  
Maupun Tidak Langsung, Tahun 2013 (miliar rupiah)

Jenis Barang Modal	Swasta/RT/ BUMN/ BUMD	Pemerintah		Jumlah
		Pusat	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bangunan Hotel & Akomodasi lainnya	20.884,93	-	-	20.884,93
2. Bangunan Restoran & sejenisnya	8.473,46	-	-	8.473,46
3. Bangunan Bukan Tempat Tinggal	19.884,10	5,10	3,89	19.893,08
4. Bangunan OR, rekreasi, hiburan, seni & budaya	12.380,71	14,33	10,04	12.405,09
5. Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan)	26.813,66	6,34	7,20	26.827,20
6. Bangunan Lainnya	8.054,75	-	-	8.054,75
7. Mesin dan Peralatan	8.714,28	95,17	73,93	8.883,38
8. Alat Angkutan	10.385,73	42,08	34,64	10.462,45
9. Barang modal Lainnya	5.409,01	1,31	1,90	5.412,23
<b>Jumlah</b>	<b>121.000,63</b>	<b>164,34</b>	<b>131,60</b>	<b>121.296,57</b>
Distribusi (%)	99,76	0,14	0,11	100,00

Sumber: BPS

Dari tabel 4.10. dapat dilihat struktur investasi sektor pariwisata baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dirinci menurut jenis barang modal dan pelaku investasinya. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak melakukan investasi untuk pembangunan gedung atau bangunan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata langsung, seperti bangunan hotel dan restoran dan sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan oleh minimnya dan terbatasnya anggaran pemerintah utamanya anggaran pembangunan, disamping upaya pemerintah memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata ini.

Di lain pihak diharapkan kalangan swasta sudah semakin sadar dan memahami pentingnya investasi di bidang pariwisata ini untuk menangkap peluang semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia di tahun-tahun mendatang. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan keadaan pada awal Pelita, dimana kemampuan swasta pada waktu itu masih sangat terbatas sehingga pemerintah mengambil peran yang lebih besar dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas dan akomodasi untuk menampung jumlah wisatawan yang mulai meningkat jumlahnya.

Walaupun demikian pemerintah masih melakukan investasi untuk bangunan bukan tempat tinggal dan bangunan yang berhubungan dan menunjang kegiatan kepariwisataan seperti bangunan untuk olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya dengan nilai yang masih relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan pihak swasta. Umumnya fasilitas bangunan ini lebih bersifat kepada pelayanan publik dan masyarakat sehingga nilainya pun tidak akan memenuhi profit keekonomian. Begitu juga pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan) yang terkait pariwisata kalau dilihat secara besaran nilainya memang juga masih terlalu kecil. Tetapi sesuai dengan tugas pemerintah sebagai agen pembangunan di segala bidang maka cerminan ini lebih kepada pelayanan masyarakat untuk menunaikan tujuan wisatanya.

Dari seluruh investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, terlihat bahwa investasi terkait sektor pariwisata pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 investasi mencapai Rp 121,30 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp 124,55 triliun. Sementara itu investasi yang dilakukan pemerintah terbesar adalah untuk mesin dan peralatan serta alat angkutan masing-masing sebesar Rp 169,11 miliar dan Rp 76,72 miliar atau masing-masing sebesar 57,14 persen dan 25,92 persen dari total investasi pemerintah. Investasi mesin dan peralatan serta alat angkutan ini pada umumnya adalah barang modal dan alat-alat pemerintah yang dipergunakan di kantor-kantor pemerintah yang mengurus kepariwisataan seperti kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta seluruh jajarannya baik di tingkat pusat dan daerah, dan Dinas Pariwisata pada pemerintah daerah tingkat I/provinsi dan pemerintah daerah tingkat II/kabupaten/kota.

Seperti pola tahun sebelumnya, pihak swasta paling banyak melakukan investasi di infrastruktur senilai Rp 26,81 triliun atau 22,16 persen dan dari total investasi swasta, diikuti dengan bangunan hotel dan akomodasi lainnya sebesar Rp 20,88 triliun, dan bangunan bukan tempat tinggal serta bangunan olah raga, rekreasi, hiburan seni & budaya masing-masing sebesar Rp 19,88 triliun dan Rp 12,38 triliun. Investasi hotel ini disamping adanya penambahan hotel baru, termasuk juga renovasi besar beberapa hotel dan akomodasi lainnya pada tahun 2013, dan pembangunan gedung-gedung untuk kegiatan pariwisata.

Secara keseluruhan, investasi yang terbesar adalah pada infrastruktur (22,12 persen dari total investasi) dimana peran swasta sangat besar, diikuti investasi pada bangunan hotel dan akomodasi lainnya (17,22 persen).

#### 4.5. Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi Pariwisata

Dalam rangka upaya meningkatkan jumlah wisman maupun wisnus di Indonesia diperlukan berbagai usaha yang terencana dan terintegrasi. Salah satu cara untuk memperkenalkan citra dan potensi pariwisata Indonesia adalah dengan melakukan promosi secara intensif dan ekstensif baik di dalam maupun luar negeri.

Telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa sektor pariwisata sangat sensitif terhadap isu perubahan dan kejadian luar biasa, oleh karenanya maka upaya untuk membangun opini yang lebih baik tentang Indonesia, baik sosial maupun politik sangat penting untuk dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah membangun informasi yang lebih proporsional mengenai situasi dan kondisi yang sebenarnya, sekaligus memperkenalkan budaya bangsa dan sumber daya pariwisata lainnya. Dengan demikian pariwisata tetap diharapkan secara berkesinambungan menjadi penghasil devisa terbesar di masa mendatang.

Promosi pariwisata yang efektif dan efisien yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta akan berdampak positif bila dapat menarik lebih banyak minat wisman untuk mengunjungi Indonesia. Dari sisi penyediaan (*supply*), dilakukan pembinaan usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata serta promosi pariwisata untuk penduduk Indonesia sendiri agar lebih mengenal budayanya.

Untuk tujuan-tujuan di atas, kemudian Pemerintah mengalokasikan sedikit anggarannya untuk sejumlah kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata. Pengeluaran pemerintah yang dimaksud di sini adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan operasional, bukan investasi, dengan ciri-ciri produk yang dibeli habis digunakan pada saat dipakai. Dalam kajian ini, jenis-jenis pengeluaran yang dicakup adalah 1) promosi pariwisata, 2)

## Struktur Pengeluaran Wisatawan dan Investasi Pariwisata

perencanaan dan koordinasi pembangunan pariwisata, 3) penyusunan statistik dan informasi pariwisata, 4) penelitian dan pengembangan pariwisata, 5) penyelenggaraan dan pelayanan informasi pariwisata, 6) keamanan dan perlindungan pariwisata, 7) pengawasan dan pengaturan, dan 8) lainnya.

Tabel 4.11. Struktur Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi dan Pembinaan Sektor Pariwisata Tahun 2013, (miliar rupiah)

Jenis Aktivitas	Pemerintah			Dist (%)
	Pusat	Daerah	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Promosi pariwisata	418,18	826,96	1.245,14	17,49
2. Rencana dan koordinasi Pembangunan Pariwisata	571,33	1.277,48	1.848,82	25,98
3. Penyusunan statistik dan Informasi Pariwisata	362,65	847,20	1.209,86	17,00
4. Penelitian dan Pengembangan	431,93	945,38	1.377,31	19,35
5. Penyelenggaraan dan Pelayanan Informasi Pariwisata	244,35	386,42	630,77	8,86
6. Pengamanan dan Perlindungan Wisatawan	126,48	142,56	269,04	3,78
7. Pengawasan dan Pengaturan	131,47	176,96	308,44	4,33
8. Lainnya	101,20	126,70	227,90	3,20
<b>Jumlah</b>	<b>2.387,59</b>	<b>4.729,67</b>	<b>7.117,27</b>	<b>100,00</b>
Distribusi (%)	33,55	66,45	100,00	

Sumber : BPS

Sebagian besar sumber pembiayaan kegiatan pemerintah di atas berasal dari anggaran rutin baik dari APBN maupun APBD, termasuk di dalamnya kegiatan yang bersumber dari anggaran Kantor Kementerian Pariwisata beserta seluruh jajarannya dan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sepanjang berhubungan dengan sektor kepariwisataan. Jadi lingkup pengeluaran ini lebih luas dari lingkup investasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yang telah dibicarakan sebelumnya

Tabel 4.11 memperlihatkan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan promosi dan pembinaan pariwisata pada tahun 2013 sebesar Rp 7,12 triliun, dengan komposisi 33,55 persen atau Rp 2,39 triliun dikeluarkan oleh pemerintah pusat sedangkan sisanya sebesar Rp 4,73 triliun oleh pemerintah daerah.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran untuk perencanaan dan koordinasi pembangunan pariwisata merupakan pengeluaran pemerintah terbesar dengan porsi 25,98 persen dari total pengeluaran atau sebesar Rp 1,85 triliun, diikuti oleh pengeluaran di bidang penelitian dan pengembangan pariwisata 19,35 persen dari total pengeluaran pemerintah. Sementara itu pengeluaran untuk promosi sendiri hanya 17,49 persen atau sebesar Rp 1,25 triliun. Pengeluaran yang cukup rendah adalah untuk pengamanan dan perlindungan wisatawan serta pengeluaran lainnya dengan porsi masing-masing sebesar 3,78 persen dan 3,20 persen. Hal ini mungkin disebabkan komponen ini telah banyak dilakukan oleh pihak swasta.

## **BAB 5**

# **ANALISIS NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL**

## BAB V

### ANALISIS NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL

#### 5.1. Peranan Pariwisata dalam Perekonomian

Kegiatan pariwisata mempunyai peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Kegiatan pariwisata mampu berperan dalam menghasilkan devisa bagi negara serta dalam penciptaan lapangan kerja dan berusaha. Sebagai contoh, pembangunan hotel atau restoran di sekitar obyek wisata akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar dan dapat pula menciptakan usaha ekonomi bagi penduduk lokal seperti pembuatan souvenir atau bingkisan.

Pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Untuk mengukur peranannya dalam perekonomian tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi melalui identifikasi semua sektor yang terkait dengan kegiatan ini. Dengan menggunakan pendekatan tabel I-O dapat diperkirakan sejauhmana peran pariwisata di masing-masing sektor yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peranan pariwisata dalam PDB menurut penggunaan (sisi *demand*) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsi rumah tangga untuk kegiatan wisata dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia, (2) porsi konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisman selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luar negeri dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata. Tabel 5.1 memperlihatkan besarnya porsi pariwisata di masing-masing komponen penggunaan PDB seperti disebutkan di atas. Sedangkan untuk melihat peran pariwisata dalam investasi nasional secara rinci disajikan dalam tabel tersendiri.

Tabel 5.1. Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Penggunaan Tahun 2013 (triliun rupiah)

Komponen	Konsumsi rumah tangga	Konsumsi pemerintah	Investasi	Ekspor	Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pariwisata	183,73	7,12	121,30	129,75	81,72
PDB Nasional	5 071,09	827,24	2 876,25	2 156,81	2 338,12
Share pariwisata (%)	3,62	0,86	4,22	6,02	3,50

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 5.1, terlihat bahwa peranan pariwisata dalam konsumsi rumah tangga mencapai 3,62 persen. Sementara itu, peranan pariwisata dalam pengeluaran pemerintah relatif kecil, yaitu hanya 0,86 persen dari total pengeluaran (*current expenditure*) pemerintah, dan ada sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya, peranan pariwisata dalam ekspor barang dan jasa sebesar 6,02 persen. Porsi ini ditentukan oleh besarnya konsumsi wisman pada tahun 2013 ini. Tentu saja peranan terbesar ada pada jasa hotel, restoran, hiburan dan angkutan yang mencapai lebih dari 85 persen dari ekspor jasa-jasa tersebut. Sementara itu peranan pariwisata dalam impor mencapai 3,50 persen. Apabila ingin melihat "*accommodation balance*", maka komposisi besaran nilai antara ekspor dan impor untuk produk terkait pariwisata menjadi sangat menentukan. Namun analisis kali ini lebih ditekankan pada peranan pariwisata dalam masing-masing struktur konsumsi yang ada dalam PDB.

Untuk peranan investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional dapat dilihat pada Tabel 5.2. Tabel tersebut juga menyajikan peranan investasi sektor pariwisata yang dirinci menurut jenis barang modal yaitu (1) bangunan, yang terdiri dari bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal; (2) infrastruktur, misalnya: jalan, jembatan dan dermaga; (3) bangunan lainnya; (4) mesin dan peralatan, (5) alat angkutan; dan (6) barang modal lainnya.

Tabel 5.2. Peranan Pariwisata dalam Investasi Nasional Tahun 2013 (persen)

Struktur Investasi	Peranan pariwisata dalam investasi
(1)	(2)
1. Bangunan (tempat tinggal dan bukan tempat tinggal)	6,28
2. Infrastruktur (jalan, jembatan, dan pelabuhan)	3,26
3. Bangunan lainnya	1,28
4. Mesin dan peralatan	3,13
5. Alat angkutan	11,16
6. Barang modal lainnya	8,51
<b>Jumlah</b>	<b>4,22</b>

Sumber: BPS

Peranan investasi sektor pariwisata terhadap investasi nasional pada tahun 2013 mencapai 4,22 persen, turun dibanding tahun 2012 yang sebesar 4,55 persen. Dilihat dari jenis barang modal, maka peranan pariwisata tertinggi ada pada jenis barang modal alat angkutan dengan persentase 11,16 persen

dari investasi nasional, sedangkan untuk porsi terendah adalah investasi pada bangunan lainnya yaitu 1,28 persen.

## 5.2. Dampak Ekonomi Pariwisata

Kegiatan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak ekonomi dan sosial baik bagi masyarakat sekitar maupun nasional secara umum. Seperti telah diuraikan pada pembahasan di atas, pengukuran kinerja pariwisata menggunakan total nilai transaksi ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata. Transaksi ekonomi pariwisata sendiri dibentuk oleh keseimbangan antara *supply* dan *demand* dari barang dan jasa dalam kaitan pariwisata. Pertemuan antara *supply* dan *demand* pariwisata dirangkum dalam Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas).

Nilai transaksi ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata (*direct economic transaction*) pada tahun 2013 mencapai Rp 441,88 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,38 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 396,65 triliun. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah belanja wisman yang mencapai 27,77 persen dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi wisnus juga mengalami kenaikan dari Rp 172,85 triliun menjadi Rp 177,84 triliun, sementara transaksi ekonomi wisnas juga mengalami kenaikan sebesar 4,61 persen. Di sisi lain, promosi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, sementara investasi pariwisata mengalami penurunan sebesar 2,41 persen.

Tabel 5.3. Ringkasan Pengeluaran Terkait Pariwisata Indonesia Tahun 2013  
(miliar rupiah)

Sektor terkait Pariwisata	Pengeluaran Terkait Pariwisata						Jumlah
	Wisman	Wisnus	Wisnas		Investasi	Promosi	
			Pre-Trip	Post-Trip			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Jasa Pariwisata</b>							
Hotel dan Akomodasi	54 884,78	19 276,54	50,80	23,93			74 236,05
Restoran dan sejenisnya	19 827,73	34 587,73	568,01	267,61			55 251,08
Angkutan domestik	9 814,08	74 622,16	816,02	384,45			85 636,71
Angkutan internasional	17 521,41	-	-	-			17 521,41
Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	2 982,93	3 350,08	1 093,22	515,05			7 941,28
Jasa seni, budaya, rekreasi dan hiburan	5 504,76	4 998,17	-	-			10 502,93
Jasa pariwisata lainnya	911,76	7 732,99	-	-			8 644,75
Souvenir	8 827,36	6 907,36	-	-			15 734,72
Kesehatan dan kecantikan	2 282,41	76,99	-	-			2 359,40
Produk industri non makanan	5 788,41	20 896,49	1 472,03	693,52			28 850,45
Produk pertanian	1 400,18	5 392,11	-	-			6 792,29
<b>Investasi Pariwisata</b>							
Bangunan hotel dan akomodasi					20 884,93		20 884,93
Bangunan restoran dan sejenisnya					8 473,46		8 473,46
Bangunan bukan tempat tinggal					19 893,08		19 893,08
Bangunan OR, rekreasi, hiburan, seni & budaya					12 405,09		12 405,09
Infrastruktur					26 827,20		26 827,20
Bangunan lainnya					8 054,75		8 054,75
Mesin dan peralatan					8 883,38		8 883,38
Alat angkutan					10 462,45		10 462,45
Barang modal lainnya					5 412,23		5 412,23
<b>Pengeluaran Pemerintah</b>						7 117,27	7 117,27
<b>Jumlah</b>	<b>129 745,81</b>	<b>177 840,61</b>	<b>4 000,08</b>	<b>1 884,56</b>	<b>121 296,57</b>	<b>7 117,27</b>	<b>441 884,91</b>

Sumber: BPS

Dari total nilai transaksi sebesar Rp 441,88 triliun pada tahun 2013, nilai transaksi yang diciptakan oleh konsumsi wisnus menyumbang 40,25 persen terhadap total nilai transaksi pariwisata, kemudian disusul oleh nilai transaksi yang diciptakan wisman yang mencapai Rp 129,75 triliun atau 29,37 persen. Sementara itu, kontribusi ketiga terbesar adalah dalam rangka investasi yang mencapai Rp 121,30 triliun atau 27,46 persen.

Dari hasil pencatatan konsumsi/transaksi tersebut ternyata kontribusi wisnus pada ekonomi pariwisata jauh lebih besar dibanding wisman dan ini telah berlangsung sejak lama. Isu mengenai keamanan lebih sensitif bagi wisman dibanding wisnus. Sedangkan isu mengenai harga/biaya lebih sensitif bagi wisnus.

Ukuran kemajuan pariwisata Indonesia yang selama ini hanya menggunakan jumlah wisman yang datang ke Indonesia belum menggambarkan keutuhan kegiatan pariwisata. Dengan kata lain kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih terfokus kepada fluktuasi jumlah wisman sebenarnya kurang tepat sebab secara ekonomi peranan wisnus jauh lebih besar. Indikator perkembangan jumlah wisman tetap penting bagi Indonesia secara politis karena menyangkut aspek pencitraan serta keamanan dan kenyamanan bagi warga asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Selanjutnya untuk mengukur peranan ekonomi pariwisata atau dampak kegiatan pariwisata terhadap keseluruhan ekonomi nasional tahun 2013 dihitung dengan menggunakan multiplier input-output berdasarkan Tabel Input-Output Indonesia tahun 2005 (updating 2008). Aspek ekonomi yang diukur adalah peranan pariwisata dalam output nasional, PDB nasional, kesempatan kerja, upah dan gaji, serta pajak tak langsung baik keseluruhan maupun sektoral. Karena transaksi ekonomi pariwisata dilakukan oleh pihak-pihak yang mengkonsumsi pariwisata secara independen (wisnus, wisnas, wisman, investor dan promosi) maka proses penghitungan dimungkinkan dilakukan secara parsial untuk masing-masing pihak tersebut.

Seperti diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, pengeluaran wisatawan (mancanegara dan nusantara), investasi di bidang kepariwisataan dan pengeluaran pemerintah untuk promosi pariwisata adalah bagian dari permintaan. Timbulnya pengeluaran-pengeluaran di sektor kepariwisataan tersebut akan berdampak positif pada penciptaan sejumlah variabel makro ekonomi, disamping dampak negatif seperti meningkatnya impor dan dampak non-ekonomi. Dengan menggunakan Tabel Input-Output, permintaan akhir tersebut diklasifikasikan kembali mengikuti klasifikasi sektor dalam Tabel I-O dan dampaknya diperoleh dengan mengalikannya dengan koefisien pengganda Leontief.

Tabel 5.4. Dampak ekonomi Pariwisata, Tahun 2013

Uraian	Output (triliun Rp)	PDB (triliun Rp)	Upah/Gaji (triliun Rp)	PTL (triliun Rp)	TK (juta org)
<b>A. Nilai Ekonomi Nasional</b>	<b>18.280,75</b>	<b>9.083,97</b>	<b>2.850,39</b>	<b>337,63</b>	<b>112,76</b>
<b>B. Nilai Ekonomi Pariwisata</b>	<b>790,01</b>	<b>365,02</b>	<b>118,34</b>	<b>13,26</b>	<b>9,61</b>
1. Wisman	229,37	109,36	36,08	4,10	2,98
2. Wisnus	317,85	150,12	48,06	5,40	4,32
3. Wisnas	10,68	4,87	1,62	0,18	0,14
4. Investasi	219,94	94,54	30,45	3,37	2,02
5. Promosi & Pembinaan	12,17	6,14	2,13	0,20	0,15
<b>C. Peranan Pariwisata (persen)</b>	<b>4,32</b>	<b>4,02</b>	<b>4,15</b>	<b>3,93</b>	<b>8,52</b>
1. Wisman	1,25	1,20	1,27	1,22	2,64
2. Wisnus	1,74	1,65	1,69	1,60	3,83
3. Wisnas	0,06	0,05	0,06	0,05	0,12
4. Investasi	1,20	1,04	1,07	1,00	1,79
5. Promosi & Pembinaan	0,07	0,07	0,07	0,06	0,14

Tabel 5.4 menyajikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap sejumlah variabel ekonomi makro, yaitu output, Produk

Domestik Bruto (PDB), upah/gaji, pajak tak langsung dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2013. Jika dibanding dengan dampak ekonomi pariwisata tahun 2012, terlihat bahwa dampak tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun demikian terjadi kenaikan peran pariwisata pada seluruh sektor di tahun 2013 ini.

### 5.2.1. Dampak Terhadap Output

Output sektor produksi terbentuk karena permintaan domestik dan luar negeri. Untuk menghasilkan output komoditi sektor-sektor ekonomi tersebut diperlukan input antara (*intermediate input*) berupa bahan-bahan dan jasa untuk proses produksi termasuk jasa faktor produksi. Dorongan permintaan terhadap produk barang dan jasa akan menciptakan perubahan nilai produksi. Permintaan atau pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman), wisatawan nusantara (wisnus), pre dan post trip wisatawan Indonesia ke luar negeri, investasi pemerintah dan swasta di sektor pariwisata, belanja pemerintah untuk pariwisata dan biaya promosi kepariwisataan akan berdampak pada penciptaan output di seluruh sektor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan secara ekonomi adalah dampak langsung berupa konsumsi barang dan jasa dan dampak tak langsung berupa interaksi antar sektor yang terjadi akibat perubahan output barang dan jasa yang dikonsumsi.

Disamping menyajikan dampak secara total, Tabel 5.4 juga menunjukkan dampak langsung dan tidak langsung atas setiap jenis pengeluaran wisatawan dan investasi. Berdasarkan Tabel Input Output tahun 2005 (*up dating* 2008), dengan struktur pengeluaran institusi kepariwisataan sebagaimana sub-bab terdahulu, diperoleh nilai output akibat adanya kegiatan pariwisata secara keseluruhan sebesar Rp 790,01 triliun yang tersebar di seluruh sektor ekonomi. Kontribusi nilai output akibat kegiatan pariwisata tersebut terhadap output/produksi nasional mencapai 4,32 persen. Dilihat menurut komponennya, dampak yang diciptakan akibat pengeluaran wisnus

memberikan andil paling besar yaitu Rp 317,85 triliun atau 1,74 persen terhadap output nasional, diikuti konsumsi wisman Rp 229,37 triliun atau 1,25 persen dari output nasional.

Sementara investasi pariwisata memberikan dampak sebesar Rp 219,94 triliun atau 1,20 persen dari output nasional. Komponen lainnya adalah pre dan post trip bagi wisatawan Indonesia ke luar negeri, meskipun dampak outputnya hanya sebesar Rp 10,68 triliun atau 0,06 persen dari output nasional, tetapi perlu mendapat perhatian karena nilainya yang cenderung meningkat setiap tahun. Biaya promosi dan pembinaan pariwisata berdampak pada penciptaan output yang hampir sama, yaitu sebesar Rp 12,17 triliun atau memiliki porsi 0,07 persen dari output nasional.

Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan peranan masing-masing pelaku pariwisata pada penciptaan output nasional: (1) perubahan dari besaran pengeluaran belanja itu sendiri, semakin besar pengeluaran semakin besar pula output yang dapat diciptakan, (2) pola pengeluarannya, artinya bila porsi pengeluaran lebih besar pada produk yang memiliki daya penyebaran besar, akan besar pula output yang tercipta di berbagai sektor.

### **5.2.2. Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Secara konsep, produk domestik bruto (PDB) atau nilai tambah bruto (NTB) merupakan bagian dari output, yaitu merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Besarnya NTB yang dihasilkan biasanya sejalan dengan nilai output yang

dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Demikian pula dengan permintaan produk pariwisata akan memberi perubahan pula pada besarnya NTB seluruh unit usaha.

Dampak kegiatan pariwisata terhadap NTB (PDB) mencapai Rp 365,02 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 4,02 persen dari total PDB nasional pada tahun 2013. Seperti halnya pada dampak terhadap output, dampak pariwisata pada PDB paling besar diciptakan oleh belanja wisnus dengan peran 1,65 persen dari PDB nasional. Hal ini memang sejalan dengan teori dimana PDB merupakan bagian dari output nasional. Sementara itu, dampak konsumsi wisman terhadap PDB sebesar 1,20 persen, investasi pemerintah dan swasta 1,04 persen, biaya promosi dan pembinaan 0,07 persen dan pre dan post-trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri 0,05 persen. Potensi besar dari pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian nasional menjadi pendorong usaha-usaha non pariwisata untuk ikut mendukung kegiatan di bidang kepariwisataan.

### 5.2.3. Dampak Terhadap Upah dan Gaji

Maraknya demo buruh akhir-akhir ini adalah karena tidak puasny mereka terhadap upah yang diterima. Seperti diuraikan pada bahasan sebelumnya, adanya aktivitas pariwisata dipercaya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang selanjutnya akan menciptakan upah/gaji berupa balas jasa pekerja. Secara konsep upah dan gaji adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja yang didasarkan pada latar belakang (*background*) pendidikan, kemampuan (*skill*), kompetensi pekerjaan maupun sektor usahanya. Dalam memproduksi barang dan jasa, faktor tenaga kerja merupakan bagian penting dari proses produksi disamping barang modal dan teknologi. Tingkat upah dapat pula mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian nasional melalui konsumsi. Upah

dan gaji dalam model ini merupakan bagian dari nilai tambah berupa balas jasa faktor tenaga kerja.

Permintaan terhadap produk barang dan jasa dalam kegiatan pariwisata berdampak pula terhadap permintaan upah dan gaji di setiap sektor ekonomi. Sesuai dengan asumsi linearitas pada model Input Output, perubahan upah dan gaji akan sejalan dengan perubahan nilai output yang dihasilkan. Pada Tabel 5.4 diperlihatkan peranan upah dan gaji dari kegiatan pariwisata terhadap upah dan gaji secara nasional, yang besarnya mencapai Rp 118,34 triliun atau 4,15 persen terhadap upah nasional. Sebagaimana dampak terhadap PDB, pengeluaran wisnus juga memberi dampak paling besar terhadap upah dan gaji yaitu 1,69 persen dari upah nasional, disusul konsumsi wisman yang berperan 1,27 persen. Investasi sektor pariwisata berdampak terhadap upah dan gaji pekerja di seluruh sektor ekonomi sebesar 1,07 persen dari upah nasional, sedangkan dampak yang diberikan promosi pariwisata serta pre dan post-trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri masing-masing hanya berperan 0,07 persen dan 0,06 persen.

#### **5.2.4. Dampak Terhadap Pajak Tak Langsung**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak yang dipungut pemerintah dibagi menjadi dua bagian utama yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah umum melalui konsumen berkenaan dengan barang dan jasa yang diproduksi, dijual, dikirim atau digunakan. Umumnya pajak tak langsung tersebut dibebankan pada biaya produksi dari barang dan jasa yang bersangkutan, sebagai contoh pajak atas makanan dan minuman yang dijual oleh suatu restoran. Dengan mengetahui struktur pajak tak langsung pada setiap sektor, pemerintah secara makro dapat melihat potensi pajak yang dimilikinya.

Tabel 5.4 menyajikan bahwa dampak kegiatan pariwisata terhadap pajak tak langsung cukup besar. Tercatat bahwa pajak tak langsung yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata mencapai Rp 13,26 triliun atau memberi sumbangan pada pajak tak langsung nasional sebesar 3,93 persen. Sumbangan terbesar diberikan oleh konsumsi wisnus yang mencapai 1,60 persen, konsumsi wisman 1,22 persen, pengeluaran investasi pariwisata 1,0 persen, pengeluaran promosi pariwisata dan pengeluaran pre dan post trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri masing-masing 0,06 persen dan 0,05 persen.

#### **5.2.5. Dampak Terhadap Tenaga Kerja**

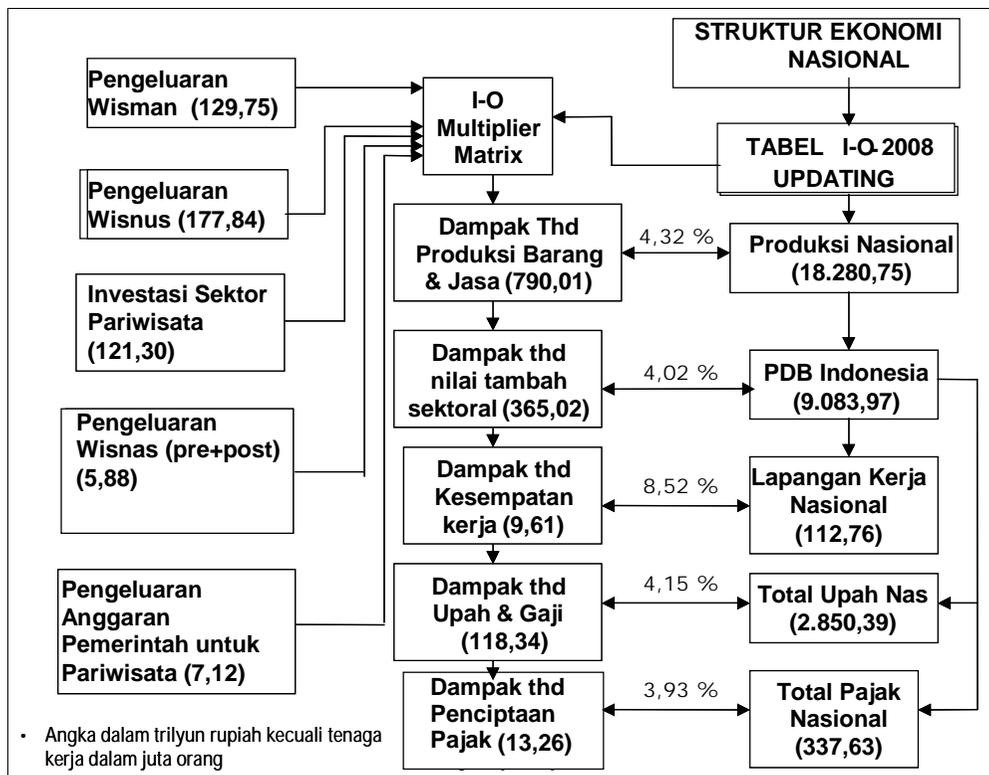
Dampak terbesar yang diciptakan dari kegiatan pariwisata adalah terhadap tenaga kerja. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha, dengan demikian peranannya sangat diperlukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat maupun nasional. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam menciptakan output barang dan jasa. Dalam model Input Output, besarnya tenaga kerja yang terserap di setiap sektor secara linier mengikuti besarnya output yang dihasilkan. Dengan demikian, permintaan di sektor pariwisata juga akan memberi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Semakin besar permintaan di sektor pariwisata, baik konsumsi wisatawan maupun investasi di bidang pariwisata, akan semakin besar pula penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor terkait.

Pada tahun 2013, dampak terhadap tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi karena adanya kegiatan pariwisata mencapai 9,61 juta orang atau 8,52 persen dari tenaga kerja nasional. Pengeluaran wisnus memberikan dampak yang terbesar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan, yang mencapai 3,83 persen dari jumlah tenaga kerja nasional, sementara pengeluaran wisman berperan

2,64 persen. Kedua permintaan ini cukup berpengaruh besar karena memang memberi dampak langsung terhadap peningkatan tenaga kerja. Permintaan yang lain kurang memberi dampak berarti bagi penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran investasi pariwisata hanya berperan 1,79 persen, promosi pariwisata 0,14 persen dan pengeluaran pre-post-trip dari wisatawan Indonesia ke luar negeri 0,12 persen.

Untuk lebih jelasnya dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata pada tahun 2013 dapat dilihat pada diagram 5.1.

Diagram 5.1. Dampak Ekonomi Pariwisata, Tahun 2013



### 5.3. Perspektif Pariwisata Indonesia dalam Konteks Dunia

Berdasarkan data Badan Pariwisata Dunia (UNWTO), jumlah kunjungan wisatawan internasional pada tahun 2013 mencapai 1.086,8 juta kunjungan atau naik sebesar 5 persen dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 1.035,2 juta kunjungan. Sebagian besar destinasi pariwisata memberikan hasil yang positif, kecuali Timur Tengah. Kawasan Asia Pasifik mengalami pertumbuhan yang paling cepat dibanding kawasan lainnya, yaitu mencapai 6,2 persen.

Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 juga dialami negara-negara di kawasan Eropa dan Afrika yang tumbuh sebesar 5,4 persen, sedangkan negara-negara kawasan Amerika mengalami pertumbuhan sebesar 3,2 persen. Sementara itu, negara-negara di kawasan Timur Tengah mengalami sedikit penurunan yaitu 0,2 persen. Penurunan ini dipicu kondisi politik di kawasan tersebut, seperti yang terjadi di Suriah dan Mesir.

Sejalan dengan kenaikan kunjungan wisatawan internasional di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Pasifik, pada tahun yang sama kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 9,42 persen. Pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional di semua kawasan.

Tabel 5.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Dunia Tahun 2012 dan 2013  
(juta orang)

Kawasan	Jumlah kunjungan		Perubahan (%)	Share 2013 (%)
	2012	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Afrika	52,9	55,8	5,4	5,1
Amerika	162,7	167,9	3,2	15,5
Asia Pasifik (tanpa Indonesia)	225,5	239,3	6,1	22,0
Eropa	534,4	563,4	5,4	51,8
Timur Tengah	51,7	51,6	-0,2	4,7
Indonesia	8,0	8,8	9,4	0,8
<b>Jumlah</b>	<b>1 035,2</b>	<b>1 086,8</b>	<b>5,0</b>	<b>100,00</b>

Sumber: *Tourism Highlights, 2014 edition*, UNWTO

Ditinjau menurut penyebaran, dari seluruh kunjungan wisatawan internasional pada tahun 2013, Eropa masih merupakan kawasan yang terbanyak menerima kunjungan yaitu 51,8 persen dari total kunjungan, mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Asia Pasifik (selain Indonesia) menerima kunjungan sebanyak 22,0 persen dan Amerika 15,5 persen dari total wisatawan internasional. Sementara itu kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 8,8 juta kunjungan atau 0,8 persen dari total kunjungan dunia. Masih kecilnya porsi kunjungan wisman di Indonesia merupakan faktor yang harus diperhatikan pemerintah terutama dalam hal penyusunan kebijakan, pengembangan dan promosi pariwisata yang lebih fokus, intensif dan ekstensif serta efisien, dengan tetap memperhatikan kondisi politik dan keamanan. Sementara itu kawasan Timur Tengah dan Afrika merupakan kawasan dengan kunjungan wisatawan terendah (sekitar 5 persen dari total kunjungan dunia).

Di sisi lain, kedatangan wisman ke suatu negara tentu menghasilkan devisa bagi negara yang dikunjungi. Pengeluaran wisman untuk akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, hiburan dan lainnya merupakan pilar ekonomi yang penting dari negara tujuan wisata sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam pembangunan.

Dari hasil pendataan UNWTO, diperoleh bahwa rata-rata pengeluaran per kunjungan wisatawan pada tahun 2013 mencapai US\$ 1.070. Asia Pasifik dan Amerika menikmati rata-rata pengeluaran per kunjungan yang tertinggi yaitu masing-masing sebesar US\$ 1.450 dan US\$ 1.360, diikuti Timur Tengah dan Eropa yaitu US\$ 920 dan US\$ 870. Sementara rata-rata pengeluaran per kunjungan ke Afrika sebesar US\$ 610. Namun demikian, dari sisi total devisa/penerimaan, kawasan Eropa merupakan penerima devisa tertinggi yaitu US\$ 489,3 miliar. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah kunjungan di kawasan ini dibanding kawasan lainnya. Pada tahun 2013, penerimaan seluruh negara dari kegiatan pariwisata mengalami peningkatan sehingga mencapai US\$ 1.159 miliar atau naik sebesar 5,3 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai US\$ 1.077,8 miliar.

Tabel 5.6. Jumlah Penerimaan dari Wisman Dunia Tahun 2012 dan 2013

Kawasan	Devisa (miliar US\$)		Perubahan (%)	Perubahan (%) (mata uang lokal, konstan)	Share 2013 (%)
	2012	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Afrika	34,3	34,2	-0,2	0,0	3,0
Amerika	212,9	229,2	7,66	6,4	19,8
Asia Pasifik (tanpa Indonesia)	320,0	348,8	9,0	8,2	30,1
Eropa	454,0	489,3	7,8	3,8	42,2
Timur Tengah	47,5	47,3	-0,3	-1,9	4,1
Indonesia	9,1	10,1	11,0		0,9
<b>Total</b>	<b>1 077,8</b>	<b>1 158,9</b>	<b>5,3</b>		<b>100,00</b>

Sumber: *Tourism Highlights, 2014 edition*, UNWTO

Dari Tabel 5.6 terlihat bahwa semua kawasan mengalami peningkatan penerimaan devisa dari pariwisata kecuali Timur Tengah dan Afrika yang mengalami penurunan penerimaan devisa masing-masing sebesar 0,3 persen dan 0,2 persen.

Jika dilihat menurut negara tujuan wisata utama, berdasarkan dua komponen utama, yaitu jumlah kunjungan dan penerimaan devisa, delapan negara masuk dalam daftar keduanya. Untuk sepuluh negara besar penerima kunjungan wisatawan, tidak banyak pergeseran posisi. Perubahan yang terjadi hanya perubahan posisi enam, dimana pada 2013 Spanyol kembali naik ke peringkat ke-3 yang sejak tahun 2010 ditempati China dan Thailand masuk dalam 10 negara tujuan utama wisatawan internasional menggeser Malaysia. Demikian pula dalam hal penerimaan devisa, Thailand menempati urutan ke-7 sebagai negara penerima devisa terbesar di dunia.

Prancis tetap menduduki urutan pertama dalam hal kunjungan wisatawan internasional. Thailand, yang menduduki peringkat ke-10 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi di 2013, yaitu sebesar 18,8 persen. Untuk negara-negara besar lainnya masih tetap menduduki posisi yang sama dengan tahun lalu dengan pertumbuhan yang bervariasi.

Tabel 5.7. Sepuluh Negara Tujuan Wisata Utama di Dunia  
Tahun 2012 dan 2013

Negara	Wisman (juta orang)		Perubahan (%)	Share 2013 (%)
	2012	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Perancis	83,0	...	...	...
2. Amerika	66,7	69,8	4,7	6,4
3. Spanyol	57,5	60,7	5,6	5,6
4. Cina	57,7	55,7	-3,5	5,1
5. Itali	46,4	47,7	2,9	4,4

### Analisis Neraca Satelit Pariwisata Nasional

6. Turki	35,7	37,8	5,9	3,5
7. Jerman	30,4	31,5	3,7	2,9
8. Inggris	29,3	31,2	6,4	2,9
9. Russia	25,7	28,4	10,2	2,6
10. Thailand	22,4	26,5	18,8	2,4
<b>Total Dunia</b>	<b>1 035,2</b>	<b>1 086,8</b>	<b>5,0</b>	

Sumber: *Tourism Highlights, 2014 edition*, UNWTO

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu negara belum menjamin besarnya devisa yang diterima negara tersebut dari kedatangan wisatawan. Hal ini terlihat dari negara penerima devisa terbesar dari wisatawan dunia adalah Amerika Serikat dengan jumlah penerimaan sebesar US\$ 139,6 miliar atau 11,3 persen dari seluruh penerimaan devisa pariwisata dunia, dimana dalam hal kunjungan Amerika Serikat menempati urutan kedua.

Sedangkan Perancis sebagai negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan, hanya berada di urutan ketiga dengan penerimaan devisa sebesar US\$ 56,1 miliar atau 5,22 persen dari seluruh devisa wisatawan, dan juga nilai tersebut menunjukkan kenaikan 4,8 persen dibanding tahun lalu. Begitu pula dengan negara Turki yang menduduki peringkat 6 dalam jumlah kunjungan wisatawan internasional, namun dalam penerimaan devisa tidak masuk dalam 10 besar.

Begitu juga dengan Russia yang menduduki peringkat 9 dalam hal penerimaan kunjungan wisatawan internasional, tidak masuk dalam sepuluh negara utama penghasil devisa pariwisata. Sebaliknya Macao dan Hongkong yang tidak masuk dalam 10 besar negara penerima wisatawan internasional, menduduki peringkat 5 dan 10 dalam hal penghasil devisa.

Tabel 5.8. Sepuluh Negara Penghasil Devisa Utama di Dunia  
Tahun 2012 dan 2013

Negara	Devisa (miliar US\$)		Perubahan (%)	Share 2013 (%)
	2012	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Amerika	126,2	139,6	10,6	12,0
2. Spanyol	56,3	60,4	7,4	5,2
3. Perancis	53,6	56,1	4,8	4,8
4. Cina	50,0	51,7	3,3	4,5
5. Macao	43,7	51,6	18,1	4,5
6. Italia	41,2	43,9	6,6	3,8
7. Thailand	33,8	42,1	24,4	3,6
8. Jerman	38,1	41,2	8,1	3,6
9. Inggris	36,2	40,6	12,1	3,5
10. Hongkong	33,1	38,9	17,7	3,4
<b>Total Dunia</b>	<b>1 077,8</b>	<b>1 158,9</b>	<b>5,3</b>	

Sumber: *Tourism Highlights, 2014 edition*, UNWTO

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output, Jakarta, November 2008

\_\_\_\_\_, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Jakarta, Desember 2009

\_\_\_\_\_, Statistik Indonesia 2013, Jakarta, Agustus 2014

\_\_\_\_\_, Statistik Kunjungan Tamu Asing 2013, Jakarta, Agustus 2014

\_\_\_\_\_, Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2013, Jakarta, Agustus 2014

\_\_\_\_\_, Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2013, Jakarta, November 2013

\_\_\_\_\_, Statistik Angkatan Kerja Nasional 2013, Jakarta, Agustus 2013

Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia (KLUPI) 1999, Jakarta, Desember 1999

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pendataan Profil Wisatawan Mancanegara 2013, Jakarta, Desember 2013

International Monetary Fund, Balance of Payments and International Investment Position Sixth Ed. (BPM6), Draft, September 2007

United Nations and World Tourism Organization, International Recommendations for Tourism Statistics, 2008, Madrid, New York, 2008

---

\_\_\_\_\_, UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition,  
Madrid, New York, 2014

United Nations, World Tourism Organization and OECD, 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF 2008),  
Madrid, New York, 2008

United Nations, European Commission, IMF, and WTO, Manual on Statistics of International Trade in Services, New York, 2002

United Nations, Central Product Classification Ver.2 , New York, 2006

\_\_\_\_\_, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Rev.4, New York, March 2006

\_\_\_\_\_, System of National Accounts 1993. Prepared by ISWGNA (Eurostat, IMF, OECD, UN, World Bank), Washington DC, 1993.

World Travel and Tourism Council, Update Principles for Travel and Tourism National Satellite Account, September 1998,

**Tabel 1. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut 10 Negara Asal Terbesar dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2013, (miliar rupiah)**

Jenis Produk	Negara Asal					
	Singapura	Malaysia	Australia	Cina	Jepang	Korea Selatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Hotel dan akomodasi lainnya	5 462,63	5 224,99	7 642,47	4 618,65	3 217,99	2 114,28
2. Restoran dan sejenisnya	2 016,66	1 823,28	3 311,22	1 519,06	1 100,19	705,78
3. Angkutan domestik	1 060,31	990,15	1 194,82	667,38	508,53	367,03
4. Angkutan Internasional	503,48	392,07	7 642,16	2 563,11	2 351,71	1 288,17
5. Biro perjalanan, operator, & pramuwisata	132,61	207,33	416,39	313,00	174,65	151,93
6. Jasa seni budaya, rekreasi, & hiburan	735,09	539,56	850,61	370,78	213,11	193,54
7. Jasa pariwisata lainnya	160,88	104,94	149,38	32,54	21,29	16,95
8. Souvenir	963,09	1 198,91	1 160,51	880,25	512,21	400,36
9. Kesehatan dan kecantikan	232,75	190,08	460,62	174,21	147,32	93,66
10. Produk industri non makanan	770,62	744,65	988,67	380,76	274,50	175,95
11. Produk pertanian	178,79	182,56	243,34	93,38	68,05	42,48
Total pengeluaran	12 216,89	11 598,51	24 060,21	11 613,13	8 589,54	5 550,13
a. Jumlah wisatawan	1 634 149	1 430 989	997 984	807 429	491 574	343 627
b. Lama Tinggal (hari)	4,17	4,82	9,62	6,21	6,86	6,40
c. Rata-rata pengeluaran per kunjungan (000 Rupiah)	7 475,99	8 105,24	24 108,81	14 382,84	17 473,55	16 151,61

**Tabel 1. Struktur Pengeluaran Wisman Menurut 10 Negara Asal Terbesar dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2013, (miliar rupiah)**

Lanjutan

Jenis Produk	Negara Asal					Jumlah
	Taiwan	Filipina	Amerika Serikat	Inggris	Lainnya	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Hotel dan akomodasi lainnya	1 202,62	1 108,02	2 094,33	1 895,70	20 303,11	54 884,78
2. Restoran dan sejenisnya	429,52	418,60	715,50	688,67	7 099,26	19 827,73
3. Angkutan domestik	197,46	228,56	380,25	357,20	3 862,40	9 814,08
4. Angkutan internasional	34,28	31,07	329,54	242,77	2.143,05	17.521,41
5. Biro perjalanan, operator, & pramuwisata	84,79	40,12	124,16	134,08	1 203,87	2 982,93
6. Jasa seni budaya, rekreasi, & hiburan	120,06	90,99	179,93	235,85	1 975,24	5 504,76
7. Jasa pariwisata lainnya	26,09	8,67	36,09	20,85	334,07	911,76
8. Souvenir	257,01	219,31	272,06	269,14	2 694,51	8 827,36
9. Kesehatan dan kecantikan	70,12	52,85	63,82	84,39	712,59	2 282,41
10. Produk industri non makanan	156,77	108,65	157,82	170,19	1 859,83	5 788,41
11. Produk pertanian	34,97	27,16	38,00	41,69	449,76	1 400,18
Total pengeluaran	2 613,69	2 333,99	4 391,50	4 140,54	42 637,69	129 745,81
a. Jumlah wisatawan	245 288	246 497	234 134	228 679	2 141 779	8 802 129
b. Lama Tinggal (hari)	5,78	5,45	10,49	10,47	8,26	7,65
c. Rata-rata pengeluaran per kunjungan (000 Rupiah)	10 655,60	9 468,63	18 756,36	18 106,34	19 907,60	14 740,28

**Tabel 2.a. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal dan Jenis Pengeluaran Tahun 2013, (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Provinsi Asal					
	Sumut	Sumbar	DKI	Jabar	Jateng	Yogya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Hotel dan akomodasi	112,20	574,95	2 136,98	2 293,09	772,05	85,30
2. Restoran dan sejenisnya	778,76	523,27	3 893,00	4 841,36	2 039,30	701,36
3. Angkutan domestik	1 902,05	1 245,02	6 644,22	7 958,84	4 398,43	1 290,27
4. Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	5,10	5,09	60,49	117,81	73,59	11,09
5. Jasa seni budaya, rekreasi dan hiburan	31,75	74,12	481,55	1 218,23	252,85	22,11
6. Jasa pariwisata lainnya	3,11	123,13	203,91	634,74	1 079,77	70,24
7. Souvenir	183,22	109,71	837,43	707,31	460,24	144,17
8. Kesehatan dan kecantikan	2,10	1,59	4,00	6,60	7,77	8,17
9. Produk industri non makanan	261,48	388,96	1 795,99	2 408,58	1 650,94	218,97
10. Produk pertanian	47,36	61,77	454,82	425,44	172,03	26,09
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>3 327,13</b>	<b>3 107,60</b>	<b>16 512,38</b>	<b>20 612,00</b>	<b>10 906,97</b>	<b>2 577,77</b>
a. Jumlah perjalanan	9 679 555	5 077 557	24 253 514	44 985 314	37 066 638	4 941 776
b. Rata-rata pengeluaran per perjalanan (000 Rupiah)	343,73	612,03	680,82	458,19	294,25	521,63

**Tabel 2.a. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal dan Jenis Pengeluaran Tahun 2013, (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Provinsi Asal					Jumlah
	Jatim	Bali	Sulut	Sulsel	Lainnya	
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Hotel dan akomodasi	2 153,60	230,51	400,90	523,28	9 993,68	19 276,54
2. Restoran dan sejenisnya	3 525,25	873,36	461,25	1 204,72	15 746,11	34 587,73
3. Angkutan domestik	6 303,33	1 338,57	776,86	1 886,52	40 878,05	74 622,16
4. Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	88,24	8,94	1,23	3,84	2 974,66	3 350,08
5. Jasa seni budaya, rekreasi dan hiburan	554,65	40,59	37,38	49,81	2 235,13	4 998,17
6. Jasa pariwisata lainnya	1 993,79	245,77	-	351,91	3 026,61	7 732,99
7. Souvenir	735,51	153,91	51,33	62,16	3 462,39	6 907,36
8. Kesehatan dan kecantikan	7,26	6,21	15,43	4,50	13,37	76,99
9. Produk industri non makanan	3 055,78	433,54	552,53	547,21	9 582,50	20 896,49
10. Produk pertanian	513,80	31,54	102,87	53,95	3 502,44	5 392,11
Total Pengeluaran	18 931,22	3 362,94	2 399,77	4 687,90	91 414,93	177 840,61
a. Jumlah perjalanan	41 308 667	7 699 266	1 882 431	7 962 784	65 178 868	250 036 370
b. Rata-rata pengeluaran per perjalanan (000 Rupiah)	458,29	436,79	1 274,83	588,73	1 402,52	711,26

**Tabel 2.b. Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan dan Jenis Pengeluaran Tahun 2013, (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Provinsi Tujuan					
	Sumut	Sumbar	DKI	Jabar	Jateng	Yogya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Hotel dan akomodasi	460,57	382,13	7 673,66	3 297,80	915,37	1 332,94
2. Restoran dan sejenisnya	1 107,21	662,23	10 874,94	5 561,86	3 977,50	1 494,57
3. Angkutan domestik	3 382,11	1 244,60	13 272,64	10 637,21	9 913,17	5 017,57
4. Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	8,12	7,90	238,88	160,64	130,99	47,91
5. Jasa seni budaya, rekreasi dan hiburan	344,41	117,98	787,61	1 146,74	277,99	276,80
6. Jasa pariwisata lainnya	36,14	16,47	2 412,63	907,39	210,20	422,86
7. Souvenir	283,92	109,11	1 269,74	1 063,18	995,14	590,82
8. Kesehatan dan kecantikan	4,50	1,71	20,93	3,35	1,92	1,96
9. Produk industri non makanan	748,52	453,32	4 277,17	3 441,83	3 203,75	1 111,82
10. Produk pertanian	220,82	67,41	1 092,71	695,90	679,30	202,48
Total Pengeluaran	6 596,32	3 062,88	41 920,90	26 915,91	20 305,31	10 499,72
a. Jumlah perjalanan	10 995 065	6 261 364	17 097 669	47 374 586	38 799 148	9 787 589
Rata-rata pengeluaran						
b. per perjalanan (000 Rupiah)	599,93	489,17	2 451,85	568,15	523,34	1 072,76

Tabel 2.b. **Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan dan Jenis Pengeluaran Tahun 2013, (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Provinsi Tujuan					Jumlah
	Jatim	Bali	Sulut	Sulsel	Lainnya	
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1. Hotel dan akomodasi	1 878,40	1 166,29	379,96	485,55	1 303,86	19 276,54
2. Restoran dan sejenisnya	4 395,62	1 112,87	424,90	1 338,39	3 637,64	34 587,73
3. Angkutan domestik	10 140,56	2 295,48	1 326,30	3 378,12	14 014,41	74 622,16
4. Biro perjalanan, operator & pramuwisata	91,87	28,97	9,67	15,57	2 609,56	3 350,08
5. Jasa seni budaya, rekreasi & hiburan	458,36	120,83	18,16	46,97	1 402,31	4 998,17
6. Jasa pariwisata lainnya	693,73	770,47	-	49,35	2 213,74	7 732,99
7. Souvenir	964,43	299,03	33,93	166,53	1 131,53	6 907,36
8. Kesehatan dan kecantikan	4,32	3,36	3,13	3,98	27,85	76,99
9. Produk industri non makanan	2 956,02	820,93	424,58	1 307,16	2 151,38	20 896,49
10. Produk pertanian	592,77	148,83	89,62	281,26	1 321,01	5 392,11
Total Pengeluaran	22 176,09	6 767,07	2 710,24	7 072,88	29 813,29	177 840,61
a. Jumlah perjalanan	43 121 437	8 500 442	1 794 164	8 758 491	57 546 415	250 036 370
b. Rata-rata pengeluaran per perjalanan (000 Rupiah)	514,27	796,08	1 510,59	807,55	518,07	711,26

**Tabel 3. Struktur Pengeluaran Wisatawan Indonesia yang ke Luar Negeri Menurut Kategori Pengeluaran dan Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi Tahun 2013, (miliar Rupiah)**

Jenis Produk	Pre-Trip	Trip	Post-Trip	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Hotel dan akomodasi lain	50,80	26 579,37	23,93	26 654,11
2. Restoran dan sejenisnya	568,01	12 072,05	267,61	12 907,67
3. Angkutan	816,02	5 402,20	384,45	6 602,67
4. Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	1 093,22	857,49	515,05	2 465,76
5. Jasa seni, budaya, rekreasi dan hiburan	-	2 046,67	-	2 046,67
6. Jasa Par, Lainnya	-	3 070,01	-	3 070,01
7. Souvenir	-	6 107,01	-	6 107,01
8. Kesehatan dan kecantikan	-	8 133,19	-	8 133,19
9. Produk non makanan	1 472,03	16 424,82	693,52	18 590,37
10. Produk pertanian	-	1 026,53	-	1 026,53
Total Pengeluaran	4 000,08	81 719,35	1 884,56	87 604,00
a. Jumlah wisatawan	8 024 876	8 024 876	8 024 876	
b. Lama Tinggal (hari)	-	6,49	-	
c. Rata-rata pengeluaran per kunjungan (000 Rupiah)	498,46	10 183,25	234,84	

**Tabel 4. Struktur Pengeluaran Wisatawan Menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi dan Jenis Wisatawan Tahun 2013, (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Wisman	Wisnus	Wisnas		Jumlah
			Pre Trip	Post Trip	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Hotel dan akomodasi lainnya	54 884,78	19 276,54	50,80	23,93	74 236,06
2 Restoran dan sejenisnya	19 827,73	34 587,73	568,01	267,61	55 251,08
3 Transport lokal	9 814,08	74 622,16	816,02	384,45	85 636,71
4. Angkutan internasional	17.521,41	-	-	-	17.521,41
5 Biro perjalanan, operator, & pramuwisata	2 982,93	3 350,08	1 093,22	515,05	7 941,28
6 Seni, budaya, rekreasi, & hiburan	5 504,76	4 998,17	-	-	10 502,94
7 Jasa pariwisata lainnya	911,76	7 732,99	-	-	8 644,74
8 Souvenir	8 827,36	6 907,36	-	-	15 734,71
9 Kesehatan dan kecantikan	2 282,41	76,99	-	-	2 359,40
10 Produk industri bukan makanan	5 788,41	20 896,49	1 472,03	693,52	28 850,45
11 Produk Pertanian	1 400,18	5 392,11	-	-	6 792,29
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>129 745,81</b>	<b>177 840,61</b>	<b>4 000,08</b>	<b>1 884,56</b>	<b>313 471,07</b>
a. Jumlah Perjalanan / kunjungan	8 802 129	250 036 370	8 024 876	8 024 876	
b. Rata-rata Lama Tinggal/ bepergian (hari)	7,65	4,22			
c. Rata-rata Pengeluaran per kunjungan/perjalanan (000 Rupiah)	14 740,28	711,26	498,46	234,84	

Tabel 5. Struktur Input Terkait Pariwisata (*triliun rupiah*)

Struktur Input	Sektor Pariwisata				
	Restoran	Hotel	Angkutan Kereta Api	Angkutan Darat	Angkutan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Input Antara	109,97	11,91	3,26	91,17	43,32
1. Pertanian	30,17	2,40	-	0,01	0,06
2. Pertambangan	0,00	0,01	0,03	-	-
3. Industri	52,74	5,61	1,37	38,17	23,58
4. Listrik, gas dan air	0,81	0,20	0,47	0,44	0,64
5. Bangunan	0,06	0,04	0,54	0,38	0,39
6. Perdagangan	18,05	1,61	0,14	4,47	3,29
7. Restoran	0,08	0,35	0,03	0,43	0,44
8. Hotel	0,05	0,03	0,02	0,15	0,20
9. Angkutan dan komunikasi	4,56	0,73	0,19	7,77	10,17
10. Lembaga Keuangan dan jasa perusahaan	3,07	0,65	0,29	7,76	3,87
11. Jasa-jasa	0,38	0,28	0,18	31,59	0,68
12. Keg. Tidak Jelas	-	-	-	-	0,00
II. Input Primer	83,75	17,45	1,40	64,29	19,55
1. Upah dan Gaji	30,74	4,96	1,07	26,30	7,05
2. Surplus usaha	39,28	10,33	0,05	10,04	6,38
3. Penyusutan	10,25	1,10	0,56	26,69	5,96
4. Pajak Tidak Langsung	3,48	1,06	0,04	1,26	0,54
5. Subsidi	-	-	(0,32)	-	(0,38)
Jumlah	193,72	29,36	4,66	155,46	62,87

Tabel 5. Struktur Input Terkait Pariwisata (*triliun rupiah*)

Lanjutan

Struktur Input	Sektor Pariwisata			
	Angkutan Udara	Jasa Penunjang Angkutan	Lemb Keu & Jasa Perusahaan	Jasa hib., rek. & budaya
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. Input Antara	29,80	16,49	173,84	12,65
1. Pertanian	-	-	0,08	0,50
2. Pertambangan	-	-	-	-
3. Industri	15,50	1,43	29,25	3,96
4. Listrik, gas dan air	0,12	1,14	4,01	0,20
5. Bangunan	0,03	3,41	18,42	0,38
6. Perdagangan	1,37	0,23	4,03	1,15
7. Restoran	1,88	0,11	9,84	0,11
8. Hotel	0,17	0,08	2,60	0,02
9. Angkutan dan komunikasi	6,81	5,24	20,67	0,78
10. Lembaga Keuangan dan jasa perusahaan	3,33	3,37	62,77	1,65
11. Jasa-jasa	0,59	1,48	22,17	3,90
12. Keg. Tidak Jelas	-	-	-	-
II. Input Primer	13,10	21,87	323,19	9,79
1. Upah dan Gaji	6,11	8,69	127,36	3,32
2. Surplus usaha	2,03	7,69	164,44	5,14
3. Penyusutan	4,48	5,06	26,38	1,16
4. Pajak Tidak Langsung	0,48	0,43	5,01	0,31
5. Subsidi	-	-	-	(0,14)
Jumlah	42,90	38,36	497,03	22,44

**Tabel 6. Struktur PMTB Pariwisata Baik yang Bersifat Langsung maupun Tidak Langsung Tahun 2013 (miliar rupiah)**

Jenis Barang Modal	Penanam Modal			Jumlah
	Swasta/ BUMN/ BUMD	Pemerintah		
		Pusat	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bangunan Hotel & Akomodasi lainnya	20 884,93	-	-	20 884,93
2. Bangunan Restoran & sejenisnya	8 473,46	-	-	8 473,46
3. Bangunan Bukan Tempat Tinggal	19 884,10	5,10	3,89	19 893,08
4. Bangunan olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya	12 380,71	14,33	10,04	12 405,09
5. Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan)	26 813,66	6,34	7,20	26 827,20
6. Bangunan Lainnya	8 054,75	-	-	8 054,75
7. Mesin dan Peralatan	8 714,28	95,17	73,93	8 883,38
8. Alat Angkutan	10 385,73	42,08	34,64	10 462,45
9. Barang modal Lainnya	5 409,01	1,31	1,90	5 412,23
Jumlah	121 000,63	164,34	131,60	121 296,57

**Tabel 7. Dampak Struktur Pekerja yang Terlibat dalam Industri Pariwisata Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013, (000 orang)**

Sektor	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Banyaknya	Persen-tase	Banyaknya	Persen-tase	Banyaknya	Distribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	1 583,1	63,84	896,5	36,16	2 479,6	25,80
2. Pertambangan, LGA	109,0	92,55	8,8	7,45	117,8	1,23
3. Industri Pengolahan	1 171,2	59,56	795,2	40,44	1 966,4	20,46
4. Listrik, Gas Air	16,2	86,36	2,6	13,64	18,7	0,19
5. Bangunan	735,4	97,09	22,0	2,91	757,4	7,88
6. Perdagangan	628,2	49,64	637,4	50,36	1 265,6	13,17
7. Restoran	340,2	47,91	369,8	52,09	710,0	7,39
8. Hotel	198,2	49,93	198,7	50,07	396,9	4,13
9. Angkutan KA	71,0	96,08	2,9	3,92	73,9	0,77
10. Angkutan darat	620,0	96,09	25,3	3,91	645,3	6,71
11. Angkutan air	66,5	94,76	3,7	5,24	70,1	0,73
12. Angkutan udara	172,0	79,63	44,0	20,37	216,0	2,25
13. Jasa penunjang angkutan	135,5	89,45	16,0	10,55	151,5	1,58
14. Komunikasi	47,4	79,20	12,5	20,80	59,9	0,62
15. Jasa-jasa lainnya	384,9	56,54	295,8	43,46	680,8	7,08
Jumlah	6 278,7	65,34	3 331,1	34,66	9 609,8	100,00

**Tabel 8. Struktur Pengeluaran Pemerintah Dalam Promosi dan Pembinaan Sektor Pariwisata (*Current Expenditure*) Menurut Jenis Aktivitas Tahun 2013 (*miliar rupiah*)**

Jenis Aktivitas	Pemerintah		
	Pusat	Daerah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Promosi pariwisata	418,18	826,96	1 245,14
2. Perencanaan dan koordinasi pemb. Pariwisata	571,33	1 277,48	1 848,82
3. Penyusunan statistik dan informasi pariwisata	362,65	847,20	1 209,86
4. Penelitian dan Pengembangan	431,93	945,38	1 377,31
5. Penyelenggaraan dan pelayanan informasi pariwisata	244,35	386,42	630,77
6. Pengamanan dan perlindungan wisatawan	126,48	142,56	269,04
7. Pengawasan dan pengaturan	131,47	176,96	308,44
8. Lainnya	101,20	126,70	227,90
Jumlah	2 387,59	4 729,67	7 117,27

**Tabel 9. Peranan Pariwisata dalam Struktur PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2013**

SEKTOR PRODUKSI	Nilai Tambah/PDB		Tenaga Kerja	
	Total (Miliar Rp)	% Par	Total (Ribu Org)	% Par
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	36 391,1	2,78	2 479,6	6,32
2. Pertambangan dan Penggalian	18 304,8	1,79	117,8	8,26
3. Industri	94 091,1	4,37	1 966,4	13,14
4. Listrik, Gas dan Air	2 119,3	3,02	18,7	7,42
5. Konstruksi	37 020,7	4,08	757,4	11,93
6. Perdagangan	21 671,8	2,06	1 265,6	5,88
7. Restoran	26 375,7	12,62	710,0	33,01
8. Hotel	36 894,3	93,91	396,9	90,81
9. Angkutan Kereta Api	1 276,4	47,50	73,9	66,87
10. Angkutan Darat	24 141,0	13,10	645,3	20,93
11. Angkutan Air	2 021,5	6,25	70,1	13,86
12. Angkutan Udara	17 502,6	22,14	216,0	74,85
13. Jasa Penunjang angkut.	6 891,5	14,91	151,5	38,26
14. Komunikasi	7 743,3	2,65	59,9	8,39
15. Jasa Lainnya	32 579,8	1,93	680,8	3,19
Jumlah	365 025,0	4,02	9 609,8	8,52